

ANALISIS PERANG M23 DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK

KONGO TAHUN 2021-2026 DENGAN KONSEP *NEW WARS*

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

REGITHA MAURA HANINDAFA ZAHRA

22323055

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

**ANALISIS PERANG ANTARA M23 DAN PEMERINTAH REPUBLIK
DEMOKRATIK KONGO TAHUN 2021-2026 DENGAN KONSEP *NEW WARS***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

REGITHA MAURA HANINDAFA ZAHRA

22323055

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERANG ANTARA M23 DAN PEMERINTAH KONGO TAHUN 2021-2026 DENGAN KONSEP *NEW WARS*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

27 Juli 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 14 Juli 2026



Regitha Maura Hanindafa Zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 Jenis Penelitian	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONFLIK BERSENJATA DI RDK DAN DINAMIKA GERAKAN KELOMPOK M23	15
2.1 Perkembangan Konflik Bersenjata di RDK.....	15
2.1.1 Sejarah Kebangkitan M23 di Tahun 2021	15
2.1.2 Kondisi Sosial dan Dampak Konflik M23 vs Pemerintah RDK.....	18
2.2 Dinamika Gerakan M23 dalam Konflik.....	21
2.2.1 Latar Belakang Identitas M23	21
2.2.2 Struktur Organisasi M23	24
2.2.3 Kepentingan Serta Capaian Aktor Utama dalam Konflik di RDK.....	25
BAB 3 ANALISIS KARAKTERISTIK NEW WARS DALAM PERANG M23 DAN PEMERINTAH RDK	29
3.1 Analisis Aktor Konflik dalam Perspektif <i>New Wars</i>	29
3.1.1 Jejaring Koalisi Aktor Utama dalam Perang M23 vs Pemerintah RDK.....	29
3.2 Tujuan Peperangan dalam Karakteristik <i>New Wars</i>	37

3.2.1 Tujuan Konflik dalam Kerangka New Wars	37
3.3 Metode Peperangan dalam Konsep New Wars	40
3.3.1 Metode Serangan M23 terhadap Warga Sipil	40
3.4 Ekonomi Konflik dan Mekanisme Pembiayaan Perang.....	45
3.4.1 Sumber Pembiayaan Kelompok Bersenjata M23.....	45
3.4.2 Sumber Pembiayaan Ilegal FARDC dan Kelompok Wazalaendo.....	50
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Rekomendasi.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian M23.....	26
Tabel 2.2 Pencapaian Pemerintah RDK	27
Tabel 3.1 Jumlah Tujuan M23 dalam Konflik	40
Tabel 3.2 Jumlah Metode M23 dalam Konflik	44
Tabel 3.3 Sumber Pendanaan M23.....	50
Tabel 3.4 Sumber Pembiayaan Ilegal FARDC dan Wazalendo.....	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Penargetan Warga Sipil.....	20
Grafik 3.2 Koalisi M23.....	30
Grafik 3.3 Koalisi Pemerintah RDK.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persebaran Kelompok Pemberontak Bersenjata Tahun 2013	2
Gambar 2.1 Peta Asal Desa Etnis Tutsi.....	23
Gambar 2.2 Struktur Organisasi M23.....	25
Gambar 3.1 List Penerima Amunisi	33
Gambar 3.2 Sasaran Roket Ke Kamp Pengungsi.....	41
Gambar 3.3 Peta Eksekusi Warga Sipil oleh M23	42
Gambar 3.4 Jumlah Korban Warga Sipil.....	43
Gambar 3.5 Peta Pos M23	46
Gambar 3.6 Tanda Terima Kendaraan Fuso	46
Gambar 3.7 Peta Kekerasan Terkait Pangan.....	47
Gambar 3.9 Peta Penguasaan Area Tambang M23	49

DAFTAR SINGKATAN

ANCDH	:	Alliance des Nationalistes Congolais pur la Defence des Droits Humains
AFDL	:	Alliance des Forces Democratiques pour la Liberation du Congo-Zaire
ALEC	:	Alliance pour la liberation de l'est du Congo
APCLS	:	Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain
CNDP	:	Congres National pour la Defense du Peuple
CMC	:	Coalition des Movement pour le Changement du Congo
FARDC	:	Forces Armees de la Republique Democratique du Congo
FAC	:	The Congoles Armed Forces
FOCA	:	Forces Combattantes Abacunguzi
FDC	:	Forces de Defense Congolaise
FDLR	:	Forces Democratiques de Defence du Peuple
FNL	:	Forces Nationales de Liberation
ICC	:	International Criminal Court
MCC	:	Mouvement congolais pour le changement
MLC	:	Mouvement for the Liberation of Congo
MPA	:	Mouvement Populaire d'Autodefense
M23	:	Mouvement du 23 Mars
NDC	:	Nduma Defence of Congo
NDC-R	:	Nduma Defence of Congo-Renove
RCD-N	:	Congoles Rally for Democracy-National
RCD-	:	ML Congoles Rally for Democracy-Liberation Movement
SADC	:	Southern African Development Comunity
UPCP	:	Union des Patriotes Congolais pour la paix
VDP	:	Volontaires pour la Defense de la Patrie

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perang antara M23 dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan menyoroti bahwa konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh perebutan kekuasaan politik, tetapi juga oleh penguasaan wilayah strategis, identitas, dan ekonomi konflik di wilayah timur RDK. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana karakter perang antara M23 dan Pemerintah RDK dapat dipahami melalui kerangka *new wars* Mary Kaldor. Kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis empat unsur utama, yaitu aktor konflik, tujuan perang, metode perang, dan bentuk pembiayaan perang. Konflik ini memperlihatkan ciri perang baru karena melibatkan aktor negara dan non-negara, tujuan yang berkaitan dengan kontrol wilayah serta identitas, metode kekerasan terhadap penduduk sipil, serta pembiayaan melalui pungutan, sumber daya alam, dan jaringan ekonomi ilegal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan konflik M23 tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas negara, tetapi juga oleh keterhubungan antara kepentingan politik, dukungan eksternal, penguasaan lokal, dan ekonomi perang.

Kata-kata kunci: M23, Pemerintah Kongo, *New wars*, konflik bersenjata, ekonomi konflik, Kivu Utara

ABSTRACT

This research discusses the war between M23 and the Government of the Democratic Republic of the Congo (DRC) by highlighting that the conflict is not only triggered by the struggle for political power but also by the control of strategic territories, identity, and the economy of the conflict in the eastern DRC. The main issue raised in this research is how the character of the war between M23 and the DRC Government can be understood thru Mary Kaldor's new wars framework. The framework is used to analyze four main elements, namely conflict actors, war objectives, war methods, and forms of war financing. This conflict exhibits the characteristics of a new type of war because it involves state and non-state actors, goals related to territorial control and identity, methods of violence against civilians, and financing thru taxation, natural resources, and illegal economic networks. Research findings indicate that the sustainability of the M23 conflict is not only due to the weak capacity of the state but also the interconnection between political interests, external support, local control, and war economy.

Keywords: M23, Congolese government, *new wars*, armed conflict, conflict economy, North Kivu

BAB 1

PENDAHULUAN

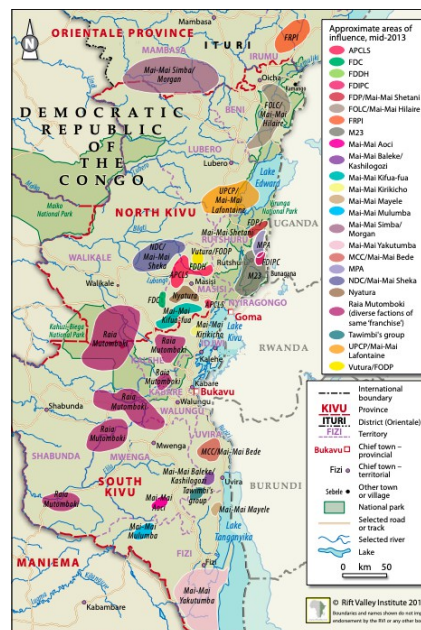
1.1 Latar Belakang

Selama 30 tahun, Republik Demokratik Kongo telah dilanda konflik berkepanjangan yang dimulai pada tahun 1996-1997 (periode pertama) ketika RDK masih disebut Zaire, sebuah perang yang berlangsung selama satu tahun antara rezim Mobutu Sese Seko dan AFDL yang dipimpin oleh Laurent Desire Kabila, di mana konflik tersebut dipicu dari dampak genosida Rwanda tahun 1994, tepat setelah kedatangan pengungsi Hutu dan kelompok ekstremis di timur Zaire, kemudian berlanjut dari tahun 1998 hingga 2003 (periode kedua perang) ketika pemerintah Laurent Desire Kabila menghadapi pemberontakan yang didukung oleh Rwanda dan Uganda. Meskipun Perjanjian Lusaka tahun 1999 berusaha mengakhiri perang, permusuhan terus berlanjut hingga pembunuhan Kabila pada 16 Januari 2001 (Cordell et al. 2026).

Berselang 10 hari kemudian, Joseph Kabila dilantik sebagai presiden untuk menggantikan ayahnya, dan konflik tersebut memasuki tahap penyelesaian politik melalui perjanjian Pretoria yang ditandatangani pada 16 Desember 2002. Perjanjian ini mengatur penghentian permusuhan, pembentukan pemerintahan transisi berbasis pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemilihan umum, penarikan pasukan asing, pelucutan kelompok bersenjata, serta pembentukan angkatan bersenjata nasional yang terintegrasi pada masa transisi 2003 (Democratic Republic of the Congo 2003).

Pemerintah RDK mengalami kelemahan dalam mengendalikan wilayah timur RDK setelah adanya upaya tahap penyelesaian konflik melalui perjanjian Pretoria di tahun 2002. Wilayah ini telah melemah dalam bidang otoritas politik, administratif, bahkan militer (karena kurangnya dana dan peralatan), sehingga tentara RDK tidak dapat memaksimalkan misinya. Kekosongan kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan, sehingga konflik yang dihasilkan bersifat berkelanjutan (Kets dan Vries 2014, 2). Faktor wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis seperti hutan lebat, pegunungan terjal, dan infrastruktur yang terbatas, juga menjadikan alasan "mengapa situasi keamanan di wilayah ini menjadi sulit untuk dikendalikan" (Simpson dan Pellegrini 2022, 3).

Gambar 1.1 Persebaran Kelompok Pemberontak Bersenjata Tahun 2013



Sumber: “The National Army” (2013)

Selain itu, kemunculan FARDC yang dibentuk melalui proses penggabungan beberapa kelompok bersenjata hasil dari Perjanjian *Global and All-inclusive Agreement* (GAA) yang mencakup FAC, MLC, RCD-N, dan RCD-ML, berlangsung secara tidak matang (Kibasomba 2005, 2). Ditambah lagi, kehadiran banyak aktor non-negara, seperti kelompok "Mai-Mai" yang tersebar di berbagai wilayah (Stearns, Verweijen dan Baaz 2013), serta kelimpahan sumber daya alam seperti emas, koltan, dan kobalt yang telah mendukung pendanaan kelompok bersenjata, memperburuk konflik di wilayah timur RDK (Hanai 2021, 2-3).

Salah satu upaya meredakan konflik dilakukan melalui perjanjian antara Pemerintah RDK dan CNDP yang ditandatangani di Goma pada 23 Maret 2009. Pemerintah RDK diwakili Raymond Tshibanda, sedangkan CNDP diwakili Desire Kamanzi. Perjanjian tersebut mengatur perubahan CNDP menjadi partai politik serta integrasi anggotanya ke dalam FARDC dan Kepolisian Nasional RDK (Democratic Republic of the Congo 2009).

Kegagalan Pemerintah RDK dalam melaksanakan sejumlah komitmen Perjanjian 23 Maret 2009 mendorong munculnya ketidakpuasan di kalangan mantan anggota CNDP yang telah diintegrasikan ke dalam FARDC. Ketegangan tersebut berkembang menjadi pemberontakan pada April 2012 yang melibatkan sejumlah perwira FARDC Rwandophone di Kivu Utara dan Kivu Selatan. Para pemberontak kemudian secara resmi mengumumkan pembentukan kelompok bersenjata *Mouvement du 23 Mars* atau M23 pada 6 Mei 2012. Nama kelompok tersebut merujuk pada tanggal penandatanganan perjanjian yang mereka anggap tidak dilaksanakan secara memadai oleh pemerintah (IPIS 2012).

M23 dipilih sebagai aktor utama dalam analisis ini karena kemampuan militer, politik, dan administratifnya yang lebih terorganisir dibandingkan dengan banyak kelompok bersenjata lokal di wilayah timur RDK. Kelompok ini tidak hanya bertempur melawan FARDC, tetapi juga merebut pangkalan militer, jalur perdagangan, area pertambangan, dan wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis. M23 kemudian membentuk struktur pemerintahan dan menunjuk pejabat lokal di beberapa wilayah yang mereka kendalikan. Hubungan dengan aktor eksternal, terutama dukungan dari Rwanda, juga telah memperkuat kapasitas operasional kelompok ini. Setelah kembali aktif pada akhir tahun 2021, M23 menjadi kelompok bersenjata non-negara paling aktif kedua di RDK pada tahun 2022 setelah ADF dan kelompok paling aktif di Kivu Utara.(Serwat 2023).

Tahun 2021 dipilih sebagai awal penelitian karena November 2021 menandai kebangkitan kembali M23 sebagai aktor bersenjata aktif setelah mengalami kekalahan pada 2013. Kebangkitan tersebut berkaitan dengan mandeknya pelaksanaan Deklarasi Nairobi 2013 dan terhentinya perundingan antara Pemerintah RDK dan delegasi M23 yang telah berlangsung sejak September 2020. M23 menggunakan serangan bersenjata untuk menuntut amnesti, pemulihan aset, kepulangan anggotanya ke RDK, reintegrasi ke FARDC, dan pemberian posisi politik (UN Group of Experts 2022).

Perang M23 dan Pemerintah RDK tidak hanya memperlihatkan pertempuran antara angkatan bersenjata negara dan kelompok pemberontak. Konflik ini melibatkan jaringan aktor negara dan non-negara, dukungan lintas batas, kelompok bersenjata lokal, pasukan regional, serta kontraktor militer swasta. M23 juga

menggunakan identitas Tutsi Kongo yang berbicara bahasa Kinyarwanda sebagai dasar tuntutan politiknya, sementara kekerasan terhadap warga sipil digunakan untuk mengendalikan wilayah dan populasi. Pendanaan perang dilakukan melalui pengumpulan pajak, pengendalian jalur perdagangan, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya alam. Karakteristik-karakteristik ini sesuai dengan konsep perang baru yang menganalisis perang melalui aspek aktor, tujuan, metode, dan bentuk pendanaan (Kaldor 2013, 2-3).

Berdasarkan runtutan peristiwa tersebut, kebangkitan M23 sejak 2021 menunjukkan bahwa konflik di wilayah timur RDK tidak dapat dipahami hanya sebagai pertempuran antara pemerintah dan kelompok pemberontak. Konflik ini berkembang melalui keterlibatan berbagai aktor, penggunaan politik identitas, kekerasan terhadap warga sipil, serta pembiayaan perang yang bersifat predator. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis perang antara M23 dan Pemerintah RDK pada periode 2021-2026 dengan menggunakan konsep *new wars*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perang terjadi antara M23 dan Pemerintah RDK dalam kerangka konsep *new wars*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika perang antara M23 dan Pemerintah RDK selama periode 2021-2026.

2. Untuk menganalisis karakteristik perang antara M23 dan Pemerintah RDK berdasarkan konsep new wars, yang mencakup aktor, tujuan, metode kekerasan, dan bentuk pembiayaan perang.

1.4 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian ini berfokus pada dinamika konflik antara kelompok bersenjata M23 dan pemerintah RDK selama periode 2021-2026. Pembahasan dibatasi pada wilayah timur RDK, terutama Kivu Utara dan Kivu Selatan, karena wilayah ini menjadi pusat perluasan kekuatan M23, perebutan wilayah strategis, dan dampak kemanusiaan. Tahun 2021 dipilih sebagai awal penelitian karena pada November 2021 M23 kembali aktif dan menyerang posisi FARDC di Kivu Utara setelah mengalami penurunan aktivitas sejak kekalahannya pada 2013. Peristiwa tersebut menandai fase baru konflik yang berkembang menjadi ekspansi wilayah, penguatan militer dan politik, serta konfrontasi berkelanjutan dengan pemerintah RDK. Sedangkan tahun 2026 menjadi titik henti analisis karena konflik belum menunjukkan proses perdamaian yang jelas. Dengan batasan-batasan ini, penelitian ini menjelaskan perkembangan konflik sejak kebangkitan M23, ekspansi militer dan politiknya, hingga berlanjutnya perebutan wilayah, tekanan terhadap warga sipil, dan proses negosiasi yang belum mencapai perdamaian permanen.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik antara M23 dan Pemerintah RDK tidak hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, tetapi juga oleh perebutan wilayah strategis dan pungutan pajak yang turut memperpanjang

konflik. Di samping itu, adanya keberadaan kawasan tambang mineral menjadi salah satu faktor yang turut mendukung keberlangsungan kelompok bersenjata M23, sehingga konflik yang terjadi ini tidak mudah berakhir meskipun pernah diadakan perjanjian damai waktu silam.

Dalam laporan penelitian yang berjudul “*Le M23 Version 2: Enjeux, Motivations, Perceptions et Impacts Locaux*” yang disusun oleh IPIS, ASSODIP, dan DIIS (2024), meneliti terkait kebangkitan kembali M23 sejak 2021 dengan melihat persoalan keamanan di provinsi Kivu Utara dari sudut pandang masyarakat lokal. Penelitian ini didasarkan pada wawancara terhadap 57 orang di wilayah Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, dan Goma, termasuk tokoh masyarakat, aparat negara, penduduk di wilayah yang dikuasai M23, serta anggota M23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik M23 tidak hanya dipicu oleh persoalan politik atau perebutan sumber daya alam, tetapi juga berkaitan dengan perebutan tanah, kontrol kekuasaan lokal, ketegangan identitas, dukungan Rwanda, dan lemahnya tata kelola negara di wilayah timur RDK. Selain itu juga laporan tersebut menjelaskan bahwa M23 membangun pengaruhnya melalui pelemahan otoritas adat, penunjukan otoritas administratif yang berpihak pada mereka, serta penerapan pungutan terhadap rumah tangga, aktivitas usaha, pertanian, jalur perdagangan, dan pos perbatasan sebagai sumber pendapatan lokal (IPIS, ASSODIP dan DIIS 2024). Namun dalam laporan memiliki kelemahan, karena penemuannya sangat bergantung pada kesaksian dan persepsi narasumber lokal, para penulis laporan ini juga mengakui bahwa beberapa kesaksian yang mereka dapatkan dapat bersifat subjektif dan tidak sepenuhnya netral.

Dalam laporan penelitian yang berjudul “*The Resurgence of the M23: Regional Rivalries, Donor Policy, and a Stalled Peace Process*” yang ditulis oleh Joshua Z. Walker (2024), Pembahasan ini berfokus pada kemunculan kembali kelompok M23 di provinsi Kivu Utara sejak November 2021. Selain itu, juga membahas tentang keterkaitannya dengan persaingan kepentingan regional, respons pemerintah Republik Demokratik Kongo, serta kebuntuan proses perdamaian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa cara Kinshasa yang melakukan pendekatan militer dengan mengutamakan kekuatan militer yang terbatas, kerja sama dengan kelompok bersenjata lokal, dan penggunaan aktor keamanan non-negara malah memperumit situasi dan memperbesar dampak kemanusiaan. Di sisi lain, proses negosiasi di Nairobi dan Luanda belum berhasil menghasilkan penyelesaian yang efektif. Penelitian ini berhasil memperluas pemahaman tentang konflik M23 dengan menempatkannya dalam konteks politik regional dan tata kelola keamanan (Walker 2024). Namun, kelemahan dalam laporan penelitian ini adalah masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diatasi, seperti kurangnya analisis mendalam tentang praktik kontrol wilayah M23 di tingkat lokal, pola interaksi antaraktor konflik di lapangan, serta implementasi solusi yang realistis dan operasional.

Dalam jurnal yang berjudul “*Conflict Minerals Regulation and Mechanism Changes in DR Congo*” yang ditulis oleh Kazuyo Hanai (2021), peneliti telah mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan internasional terkait regulasi mineral konflik yang tercantum dalam Dodd-Frank Act pasal 1502 dengan tujuan guna untuk membatasi pembiayaan kelompok bersenjata melalui eksploitasi sumber

daya mineral yang berada di RDK. Jurnal tersebut telah menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut telah berhasil mempengaruhi sejumlah aktor ekonomi, misalnya dengan mendorong rantai pasok yang lebih transparan, namun ternyata dengan adanya kebijakan tersebut belum mampu mengubah struktur kekuasaan lokal yang menopang keberlanjutan konflik. Peneliti tersebut secara tajam mengkritik terkait pendekatan kebijakan internasional yang cenderung mengabaikan konteks sosial-politik lokalnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini lebih banyak memberikan tekanan administratif dan ekonomi pada penambang skala kecil, sementara aktor kekuasaan lokal dan milisi bersenjata tetap menemukan cara-cara terbaru mereka untuk tetap mempertahankan kontrol atas wilayah tambang (Hanai 2021). Akan tetapi, dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yang terletak pada minimnya eksplorasi terhadap respons dan strategi adaptif dari komunitas lokal. Bagaimana masyarakat lokal, termasuk penambang rakyat atau organisasi sipil turut menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi ini juga tidak dibahas secara mendalam.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, secara keseluruhan belum menjelaskan terkait hubungan antara aktor konflik, tujuan, metode perang dan sumber pembiayaan yang dilakukan oleh M23 dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan suatu alasan untuk meneliti perang antara M23 dan pemerintah RDK dalam konsep *new wars*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan konsep *new wars* yang diusulkan oleh Mary Kaldor untuk menganalisis konflik antara M23 dan pemerintah RDK. *New*

wars berarti perang di era globalisasi, perang ini terjadi di wilayah yang otoritas negara telah menjadi sangat lemah. Ini adalah konsekuensi dari keterbukaan suatu negara terhadap dunia luar. Logika perang ini berbeda dari perang-perang lama (*old wars*), karena dalam perang-perang baru (*new wars*), perang ini akan dianalisis melalui empat faktor, yaitu aktor, tujuan, metode, dan bentuk pendanaan (Kaldor 2013, 2).

1. Aktor: Mary Kaldor menjelaskan bahwa *new wars* tidak lagi didominasi oleh tentara resmi negara saja, tetapi juga melibatkan kombinasi angkatan bersenjata resmi, kelompok bersenjata, jihadis, paramiliter, kontraktor keamanan swasta, penguasa perang, dll (Kaldor 2013, 2).
2. Tujuan: Jika dalam *old wars* berperang untuk kepentingan geopolitik, hal ini berbeda dalam *new wars* yang diperjuangkan atas nama identitas (etnis, agama, atau suku). Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses kekuasaan negara bagi kelompok-kelompok tertentu, dan bukan untuk melaksanakan kebijakan atau program demi kepentingan publik. Hal ini terkait dengan meningkatnya politik identitas yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi baru, migrasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau antar negara, serta melemahnya ideologi politik yang lebih inklusif. Mobilisasi politik berbasis identitas dalam *new wars* menjadi tujuan perang itu sendiri, dan bukan sekadar alat perang (Kaldor 2013, 2).
3. Metode: Untuk menaklukkan suatu wilayah dalam *new wars*, pertempuran jarang terjadi dan wilayah yang ditaklukkan umumnya

diperoleh melalui cara-cara politik, seperti pengendalian populasi. Teknik yang sering digunakan adalah pemindahan penduduk dan pemindahan paksa mereka yang memiliki identitas atau ideologi yang berbeda. Di mana, dalam metode ini kekerasan terutama diarahkan terhadap warga sipil sebagai cara untuk mengendalikan wilayah daripada melawan pasukan musuh (Kaldor 2013, 2-3).

4. Bentuk-bentuk keuangan: Penurunan pendapatan pajak di negara yang lemah dapat mendorong bentuk pembiayaan swasta yang bersifat predator. Pendanaan ini dapat berasal dari penjarahan, pemerasan, pungutan “pajak”, serta penyelundupan barang-barang ilegal lainnya. Perang dalam konsep *new wars* sering kali terkait dengan keuntungan ekonomi. Namun, batas antara aktor yang menggunakan kekerasan politik sebagai kedok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan aktor yang melakukan kegiatan ekonomi predator untuk membiayai tujuan politik mereka seringkali sulit untuk dibedakan (Kaldor 2013, 3).

Dengan demikian, untuk menganalisis *new wars*, tidak cukup hanya berfokus pada satu faktor saja, karena dalam konsep ini, perang harus dianalisis dengan menggunakan keempat faktor ini untuk memberikan analisis yang lengkap dan menyeluruh.

1.7 Argumen Sementara

Penelitian ini berargumen bahwa kebangkitan kembali M23 pada 2021 menandai perubahan karakter perang antara M23 dan Pemerintah RDK yang semakin mencerminkan konsep *new wars* Mary Kaldor. Kebangkitan tersebut tidak

hanya mengawali kembali serangan bersenjata, tetapi juga memperluas jaringan aktor negara dan non-negara, memperkuat penggunaan identitas Tutsi sebagai dasar tuntutan politik, meningkatkan kekerasan dan kontrol terhadap penduduk sipil, serta membentuk sumber pembiayaan melalui pungutan ilegal, penguasaan wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam. Karakter tersebut menunjukkan bahwa perang tidak semata-mata bertujuan mengalahkan lawan secara militer, tetapi juga mempertahankan pengaruh politik, mengendalikan populasi dan wilayah strategis, serta memperoleh sumber pendapatan untuk menjaga keberlanjutan konflik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada pencarian makna dari gejala sosial. Pendekatan ini bukan bertujuan untuk mengukur kuantitas melainkan untuk mendalami struktur makna dalam peristiwa.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup aktor non-negara dan negara, yaitu M23 sebagai kelompok militan bersenjata dan Pemerintah RDK serta FARDC sebagai instrumen utama pemerintah. Sedangkan objek penelitian ini menganalisis dari aspek aktor, tujuan, metode, dan bentuk-bentuk keuangan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Semua data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen tertulis. Peneliti mengakses artikel ilmiah,

buku dan laporan resmi yang memuat informasi tentang konflik yang terjadi di Republik Demokratik Kongo.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, laporan lembaga penelitian, dokumen resmi, dan berita kredibel yang membahas konflik M23 dengan Pemerintah RDK. Data yang terkumpul kemudian dipilah dan dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti aktor konflik, tujuan, metode kekerasan, serta sumber pendanaan perang. Kemudian, penulis menganalisis data tersebut menggunakan konsep *new wars* untuk melihat bagaimana konflik M23 berkembang dan mengapa konflik tersebut dapat terus berlanjut.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I, membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, awalan pembahasan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah konflik di RDK, yang selanjutnya juga menjelaskan terkait alasan mengapa perang antara M23 dan Pemerintah RDK penting untuk diteliti melalui kerangka *new wars* Mary Kaldor, terutama untuk melihat keterlibatan aktor negara dan non-negara, transformasi tujuan perang, metode peperangan, serta ekonomi konflik yang telah menopang keberlanjutan kekerasan di wilayah tersebut.

Bab II, akan membahas mengenai gambaran umum konflik internal di RDK dan dinamika gerakan M23. Dalam pembahasan pada bab ini, akan diawali dengan

perkembangan konflik di RDK, termasuk sejarah perkembangan konflik internal, serta kondisi sosial dan dampak konflik. Selanjutnya pada bab ini juga akan menguraikan identitas dan latar belakang pembentukan M23, struktur organisasi kelompok tersebut, serta kepentingan dan capaian M23 dalam konflik tersebut.

Bab III, berisi analisis konflik antara M23 dan Pemerintah RDK dalam kerangka *new wars* oleh Mary Kaldor. Di dalam bab ini juga akan membahas penerapan konsep *new wars* terhadap dinamika konflik yang terjadi di timur RDK dengan menggunakan beberapa indikator utama, yaitu aktor konflik, tujuan dan metode perang, serta sumber-sumber keuangannya.

Bab IV, membahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian, yang merangkum temuan utama mengenai karakter konflik M23 dan Pemerintah RDK dalam perspektif *new wars*. Pada bab kesimpulan ini juga akan memuat saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONFLIK BERSENJATA DI RDK DAN DINAMIKA GERAKAN KELOMPOK M23

2.1 Perkembangan Konflik Bersenjata di RDK

Konflik yang terjadi di wilayah Republik Demokratik Kongo, khususnya di wilayah timur RDK, adalah salah satu konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade tanpa solusi yang jelas. Tentu saja, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga didasarkan pada kondisi sosial dan ekonomi, serta melemahnya peran negara dalam pengelolaan wilayahnya sendiri (Stearns, Verweijen, dan Baaz 2013).

2.1.1 Sejarah Kebangkitan M23 di Tahun 2021

M23 sempat mengalami kekalahan pada November 2013, namun ternyata kekalahan tersebut ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan perselisihan antara kelompok tersebut dan Pemerintah RDK. Deklarasi Nairobi pada Desember 2013 menyatakan terkait pemberian amnesti atas tindakan perang dan pemberontakan, pemulangan pengungsi, serta pengembalian harta mereka. Namun, Pemerintah RDK tidak melaksanakan ketentuan tersebut secara menyeluruh. Sebagian anggota M23 kembali secara mandiri ke RDK, sedangkan beberapa ratus anggota lainnya tetap berada di kamp militer di Uganda dan Rwanda (Walker 2024, 13-14).

Upaya penyelesaian tersebut kembali dilakukan melalui pertemuan di Kigali pada Oktober 2019 yang melibatkan kepala intelijen FARDC, mantan pemimpin M23 Jean-Marie Runiga, dan kepala badan intelijen Rwanda. Pertemuan tersebut

menghasilkan kesepakatan awal mengenai reintegrasi mantan anggota M23 setelah mengikuti pelatihan ulang. Peta Jalan Kigali juga mencakup pencabutan surat penangkapan terhadap sejumlah pemimpin M23, pembebasan anggota yang ditahan karena pemberontakan, serta reintegrasi anggota yang memenuhi syarat ke dalam FARDC dan lembaga pengelola taman nasional. Setelah berada di Kinshasa hampir satu tahun, delegasi M23 meninggalkan ibu kota, sementara pelaksanaan kesepakatan sebelumnya belum menunjukkan kemajuan yang berarti (Walker 2024, 14-15).

Kebuntuan semakin kuat setelah Presiden Felix Tshisekedi membentuk Program Perlucutan Senjata, Demobilisasi, Pemulihan Masyarakat, dan Stabilisasi atau P-DDRCS pada 4 Juli 2021. Strategi program tersebut menolak pemberian amnesti kepada pelaku genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia berat. P-DDRCS juga menolak reintegrasi kelompok bersenjata secara kolektif ke dalam FARDC. Ketentuan tersebut mempertanyakan keberlanjutan Peta Jalan Kigali 2019 karena peta jalan itu sebelumnya membuka reintegrasi anggota M23 secara menyeluruh ke dalam lembaga negara. Perbedaan antara kebijakan pemerintah dan tuntutan M23 kemudian mempersempit ruang penyelesaian melalui perundingan menjelang akhir 2021 (Walker 2024, 16).

Meskipun kebuntuan perundingan memperkuat ketidakpuasan M23, kebangkitan kelompok tersebut pada 2021 tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan internal dengan Pemerintah RDK. Faktor regional juga berperan penting, khususnya memburuknya hubungan antara Rwanda dan Uganda. Kerja sama

ekonomi dan keamanan antara Kinshasa dan Kampala pada 2021 meningkatkan kekhawatiran Pemerintah Rwanda terhadap perluasan pengaruh Uganda di wilayah timur RDK. Kondisi tersebut mendorong keterlibatan Rwanda dalam mendukung operasi M23 (Walker 2024, 17-19).

Serangan M23 terhadap posisi FARDC di Ndiza, Cyanza, dan Runyoni, pada 7 November 2021 telah membuktikan bahwasannya kelompok tersebut mulai bangkit kembali. Serangan itu berlangsung setelah delegasi M23 meninggalkan Kinshasa pada Oktober 2021 karena perundingan dengan pemerintah tidak menunjukkan kemajuan. Intensitas kekerasan kembali meningkat pada 20 dan 21 November 2021 ketika sekitar seratus anggota M23 yang bersenjata berat menyerang pangkalan Taman Nasional Virunga di Bukima dan merebut persediaan senjata. Rangkaian serangan tersebut menandai kembalinya aktivitas bersenjata M23 setelah perundingan antara delegasinya dan Pemerintah RDK tidak menunjukkan kemajuan (Walker 2024, 17).

Tujuan penggunaan kekuatan bersenjata semakin terlihat dalam pertempuran di Bunagana pada 28 Maret 2022 ketika M23 mengerahkan sekitar 400 anggota (Walker 2024, 19). Berdasarkan keterangan 6 anggota M23 yang ditangkap, Sultani Makenga merencanakan penguasaan Bunagana, Rutshuru, dan Rumangabo, pemutusan jalan strategis Goma-Rutshuru, serta perebutan Goma. Operasi tersebut dirancang untuk memaksa Pemerintah RDK menerima tuntutan mengenai amnesti, pengembalian aset, kepulangan anggota M23 ke RDK, integrasi ke dalam FARDC, dan pemberian posisi politik (UN Group of Experts 2022). Sehingga serangan terhadap FARDC akan digunakan sebagai instrumen tekanan militer untuk

memperoleh konsesi politik yang tidak berhasil dicapai M23 melalui proses perundingan sebelumnya (Walker 2024, 19).

2.1.2 Kondisi Sosial dan Dampak Konflik M23 vs Pemerintah RDK

Kondisi masyarakat di wilayah timur RDK yang memprihatinkan dapat menjadi salah satu alasan mengapa konflik berkembang menjadi perang yang berkelanjutan. Wilayah ini kaya akan sumber daya mineral, seperti kobalt, emas, dan koltan, yang bernilai tinggi dalam rantai pasar global sehingga menarik kepentingan berbagai pihak untuk menguasainya (Hanai 2021, 2). Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat justru mengalami kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan ketidakamanan berkepanjangan akibat penguasaan sumber daya alam oleh aktor bersenjata seperti M23. Situasi ini mencerminkan fenomena kutukan sumber daya alam (*resource curse*), yaitu ketika kekayaan alam menjadi pemicu konflik, eksploitasi, dan perebutan kekuasaan, bukan mendorong pembangunan (Olund dan Quinn 2021, 2).

Ketika kebangkitan M23 sejak November 2021, terjadi pertempuran di wilayah Rutshuru dan memaksa sedikitnya 11.000 penduduk menyeberang ke Uganda dalam waktu singkat. Sebagian besar pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak yang meninggalkan rumah, lahan pertanian, ternak, serta sumber penghasilan mereka. Perpindahan tersebut tidak hanya memisahkan masyarakat dari tempat tinggalnya, tetapi juga menghentikan kegiatan pertanian yang menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari (UNHCR 2021) .

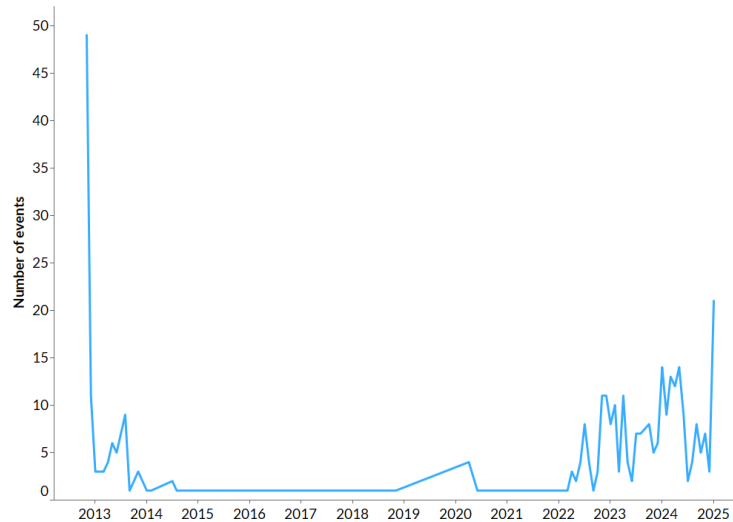
Perluasan operasi M23 sepanjang 2022 kemudian menyebabkan sekitar setengah juta penduduk meninggalkan tempat tinggalnya di Kivu Utara. Pengungsian terjadi secara berulang karena wilayah yang sebelumnya dianggap aman kembali menjadi lokasi pertempuran. Menjelang akhir 2023, hampir satu juta orang diperkirakan telah mengungsi akibat konflik yang berkaitan dengan kebangkitan M23 (Amnesty International 2023).

Situasi masyarakat semakin memburuk pada 2024 ketika lebih dari setengah juta pengungsi di sekitar Goma menghadapi ancaman keamanan dan hambatan penyaluran bantuan kemanusiaan. Jumlah pengungsi di Goma dan Nyiragongo bertambah sekitar 137.000 orang sejak Desember 2023 hingga Juli 2024. Pertambahan tersebut meningkatkan kepadatan kamp serta memperbesar kebutuhan terhadap pangan, tempat tinggal, air bersih, pelayanan kesehatan, dan perlindungan. Keterbatasan fasilitas juga meningkatkan risiko penyakit, kekerasan berbasis gender, dan eksploitasi terhadap kelompok rentan (Human Rights Watch 2024).

Grafik 2.1 Penargetan Warga Sipil

Civilian targeting by the M23 and RDF in the DRC

1 November 2012 - 28 January 2025



Sumber: ACLED 2025

Eskalasi pada 2025 memperluas dampak konflik dari wilayah pedesaan menuju pusat ekonomi dan permukiman padat. M23 dan RDF menguasai Masisi yang menjadi wilayah penambangan emas dan koltan, kemudian bergerak ke Minova dan Sake yang menjadi jalur pasokan utama menuju Goma (Serwat 2025). M23 juga memperluas kendalinya ke kota-kota pertambangan Lumbishi, Numbi, dan Shanje di Kivu Selatan (Serwat 2025). ACLED mencatat bahwa penargetan langsung terhadap warga sipil mencakup kurang dari 15% operasi tahunan M23 sejak kelompok tersebut kembali aktif pada 2021 (Serwat 2025). Namun, lebih dari 25 peristiwa penargetan warga sipil terjadi pada Januari 2025 ketika M23 dan RDF berupaya menguasai Goma, yang menjadi jumlah bulanan tertinggi sejak pengambilalihan kota tersebut pada November 2012 (Serwat 2025).

Dampak tersebut berlanjut hingga 2026 ketika perluasan operasi M23 dan RDF mencapai Uvira di Kivu Selatan. Pertempuran sebelum penguasaan Uvira

menewaskan sedikitnya 74 warga sipil, melukai 83 orang, dan menyebabkan sekitar 200.000 penduduk meninggalkan wilayah tersebut, termasuk lebih dari 30.000 orang yang mengungsi ke Burundi. Pendudukan kota dari 10 Desember 2025 hingga 17 Januari 2026 juga menyebabkan keluarga terpisah, warga kehilangan tempat tinggal, serta korban kekerasan seksual kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena fasilitas kesehatan tidak berfungsi secara normal. Penculikan dan dugaan perekrutan paksa terhadap laki-laki serta anak laki-laki semakin memperbesar rasa takut di kalangan masyarakat (Human Rights Watch 2026).

2.2 Dinamika Gerakan M23 dalam Konflik

M23 tidak hanya bergerak sebagai kelompok bersenjata, tetapi juga memiliki identitas politik, struktur organisasi yang tersusun, serta kepentingan strategis yang jelas. Keberadaan kelompok ini menunjukkan bahwa konflik di wilayah timur RDK telah berkembang menjadi konflik yang melibatkan aktor non-negara dengan kapasitas yang semakin kuat. Kapasitas tersebut terlihat dari kemampuan M23 dalam menguasai wilayah, mengatur pergerakan penduduk, membangun jaringan dukungan, serta memanfaatkan sumber daya lokal untuk mempertahankan operasi militernya. Oleh karena itu, M23 tidak dapat dipahami hanya sebagai milisi biasa, melainkan sebagai aktor konflik yang memiliki peran penting dalam membentuk dinamika perang antara kelompok bersenjata dan negara di RDK (Serwat 2023).

2.2.1 Latar Belakang Identitas M23

Kelompok M23 didirikan pada 2012 oleh sejumlah mantan anggota CNDP sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah RDK yang dianggap gagal

memenuhi isi Perjanjian Damai 23 Maret 2009. Perjanjian tersebut seharusnya menjadi dasar perdamaian dan integrasi mantan anggota CNDP ke dalam FARDC, tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya meredakan ketegangan politik dan militer di wilayah timur RDK (Afriye 2025). Akibatnya, sebagian eks-CNDP kembali mengangkat senjata dan membentuk M23 sebagai kelompok pemberontak bersenjata baru. Namun, M23 tidak dapat dipahami sebagai kelanjutan penuh dari CNDP, karena basis rekrutmennya lebih kecil dan dukungan sosialnya lebih terbatas. Berbeda dengan CNDP yang sempat memperoleh dukungan dari sebagian komunitas Hutu Kongo dan Banyamulenge, M23 gagal membangun dukungan luas dari kelompok-kelompok tersebut, bahkan ketika mencoba menjangkau komunitas Hema dan Lendu di Ituri. Dukungan yang di dapatkan M23 juga tidak menyeluruh di kalangan Tutsi Kongo, karena semenjak pergantian kepemimpinan dari Laurent Nkunda kepada Bosco Ntaganda telah memperdalam perpecahan internal. Pada awal pembentukannya, M23 hanya mampu menarik kurang dari 1.000 mantan pejuang CNDP, jauh lebih kecil dibandingkan CNDP sebelum integrasi yang diperkirakan memiliki 4.000 hingga 7.000 pasukan (IPIS 2012).

Gambar 2.1 Peta Asal Desa Etnis Tutsi



Sumber: IPIS (2012)

Pembentukan M23 juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika identitas Tutsi Kongo, karena sebagian aktor M23 menggunakan isu perlindungan komunitas Tutsi sebagai dasar legitimasi politik dan militer. M23 mengklaim gerakannya mewakili keluhan warga Kongo keturunan Rwanda, khususnya komunitas Tutsi di provinsi Kivu Utara, terkait perlindungan dari kekerasan FDLR, pemulangan pengungsi Tutsi dari Rwanda, dan ketidakjelasan status kewarganegaraan kelompok berbahasa Kinyarwanda (Rwandophone) di RDK. Klaim tersebut muncul dari pengalaman sebagian Tutsi Kongo yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi karena sering dipersepsikan dekat dengan Rwanda, terutama setelah keterlibatan Rwanda dalam konflik di timur RDK (Shepherd 2018, 6). Pengaruh politik yang di dapatkan M23 juga lebih sempit dibandingkan CNDP dan RCD-G, sebab basis

dukungannya di kalangan Tutsi Kongo lebih rendah dan banyak warga menolak pendekatan M23 yang terlalu menggunakan kekerasan (Shepherd 2018, 8).

2.2.2 Struktur Organisasi M23

M23 dibentuk pada Mei 2012 oleh mantan anggota CNDP yang sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata RDK. Pembentukan M23 berawal dari pembelotan sejumlah perwira dan prajurit FARDC yang menilai Pemerintah RDK tidak melaksanakan Perjanjian 23 Maret 2009 secara penuh. Nama M23 atau *Mouvement du 23 Mars* kemudian diambil dari tanggal penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu 23 Maret 2009. Aktivitas kelompok ini sempat menurun setelah mengalami kekalahan militer pada November 2013, tetapi M23 kembali melakukan serangan terhadap FARDC pada November 2021 (Human Rights Watch 2022).

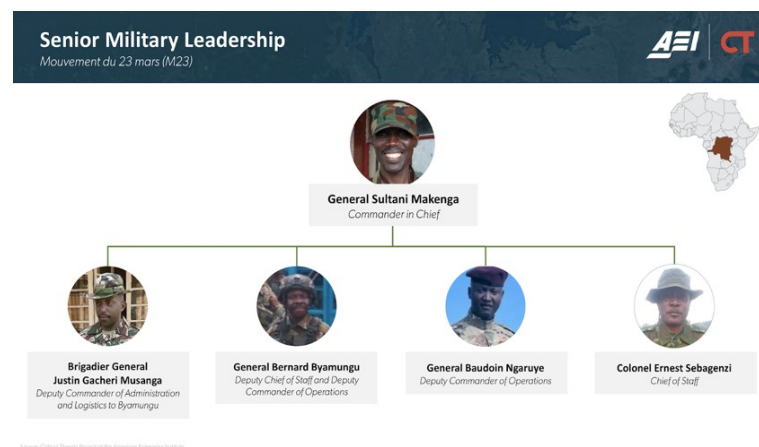
Setelah kembali aktif pada 2021, M23 mempertahankan pembagian organisasi antara struktur politik dan struktur militer. Struktur politik dipimpin oleh Bertrand Bisimwa sebagai presiden M23 yang bertanggung jawab terhadap arah politik dan representasi kelompok dalam proses perundingan. Bisimwa dibantu oleh Benjamin Mbonimpa sebagai sekretaris eksekutif, Lawrence Kanyuka sebagai juru bicara politik dan negosiator, serta Erasto Bahati sebagai pejabat yang menangani keuangan organisasi. Sementara itu, struktur militer dipimpin oleh Emmanuel Sultani Makenga sebagai panglima tertinggi M23. Makenga dibantu oleh Yusuf

Mboneza yang menjalankan fungsi wakil komandan bidang operasi dan intelijen (UN Group of Experts 2022).

Sumber: Critical Threads (2025)

Susunan tersebut menunjukkan bahwa struktur internal M23 terbagi menjadi cabang politik dan cabang militer yang memiliki jabatan kepemimpinan berbeda.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi M23



Cabang politik mencakup jabatan presiden, sekretaris eksekutif, juru bicara politik sekaligus negosiator, dan pejabat keuangan, sedangkan cabang militer dipimpin oleh panglima tertinggi serta beberapa wakil komandan (UN Group of Experts 2023). Pemetaan kepemimpinan tahun 2025 masih menempatkan Sultani Makenga sebagai panglima tertinggi M23, meskipun susunan tersebut merupakan hasil penilaian karena M23 tidak memublikasikan struktur militernya secara resmi (Critical Threats Project 2025).

2.2.3 Kepentingan Serta Capaian Aktor Utama dalam Konflik di RDK

Pada November 2021, M23 kembali melakukan serangan terhadap posisi FARDC di Chanzu dan Runyoni, wilayah Rutshuru, Kivu Utara (UN Group of Experts 2022). Peristiwa tersebut menandai kebangkitan kembali M23 setelah

aktivitas militernya menurun selama beberapa tahun (Serwat 2023). Kepentingan M23 pada periode ini terlihat melalui upaya memperoleh pengakuan politik, memperkuat narasi perlindungan komunitas Tutsi Kongo berbahasa Kinyarwanda, dan meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah RDK (Walker 2024). Kelompok ini juga menguasai wilayah perbatasan, jalur logistik, pusat pemerintahan lokal, dan kawasan pertambangan untuk memperkuat kemampuan militer serta sumber pendapatannya (IPIS 2025).

Tabel 2.1 Pencapaian M23

Waktu	Pencapaian M23	Deskripsi
7 November 2021	Menyerang Chanzu-Runyoni	Awal kebangkitan
13 Juni 2022	Merebut Bunagana	Menguasai perbatasan
April 2023	Mempertahankan Rutshuru, Bunagana, dan Rumangabo	Kontrol berlanjut
30 April 2024	Merebut Rubaya	Menguasai tambang koltan
21 Januari 2025	Merebut Minova	Membuka jalur Goma
27 Januari 2025	Mengambil alih Goma	Ibu kota Kivu Utara
28 Januari 2025	Menguasai Bandara Goma	Mengendalikan akses udara
16 Februari 2025	Mengambil alih Bukavu	Ibu kota Kivu Selatan
20 Maret 2025	Masuk ke Walikale	Memperluas wilayah mineral
10 Desember 2025	Memasuki Uvira	Dekat perbatasan Burundi
19 Maret 2026	Mempertahankan Goma dan Bukavu	Kontrol tetap bertahan

Sumber: Anadolu Agency (2021), UN Group of Experts (2022), Serwat (2023), Walker (2024), IPIS (2025), Associated Press (2025), Reuters (2025), Le Monde (2025), Human Rights Watch (2025), dan Critical Threats Project (2026).

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa serangan terbatas pada 2021 berkembang menjadi penguasaan wilayah yang lebih luas. M23 tidak hanya merebut kota, tetapi juga mengendalikan perbatasan, jalur pasokan, bandara, dan kawasan pertambangan (IPIS 2025). Capaian tersebut memperkuat posisi M23 dalam konflik dan proses perundingan dengan pemerintah RDK (Angelo, Ford, and

Karr 2026). Pemerintah RDK merespons kebangkitan M23 melalui jalur militer, diplomatik, regional, dan hukum internasional. Pada 9 November 2021, FARDC merebut kembali Chanzu dan Runyoni setelah posisi tersebut diserang oleh M23 (Ahmed 2021).

Tabel 2.2 Pencapaian Pemerintah RDK

Waktu	Pencapaian Pemerintah RDK	Deskripsi
9 November 2021	Merebut kembali Chanzu- Runyoni	Memulihkan posisi FARDC
30 Oktober 2022	Mengusir Vincent Karega	Tekanan diplomatik
November 2022	Menerima EACRF	Dukungan keamanan regional
November 2022	Komunike Luanda	Menuntut penarikan M23
15 Desember 2023	Pengerahan SAMIDRC	Mendukung operasi FARDC
24 April 2025	Komitmen gencatan senjata	Membuka dialog awal
27 Juni 2025	Perjanjian RDK-Rwanda	Kerangka perdamaian
19 Juli 2025	Deklarasi Doha	Prinsip negosiasi
15 November 2025	Kerangka Damai Doha	Proses perdamaian
23 April 2026	Komite Pengawasan	Meninjau pelaksanaan
26 Juni 2026	Gugatan ke ICJ	Menempuh jalur hukum

Sumber: News Agencies (2022), Voice of America (2022), Institute for Security Studies (2023), Southern African Development Community (2024), The Guardian (2025), U.S. Department of State (2025), Al Jazeera (2025), DRC in Qatar (2025, 2026), U.S. Department of State (2026), Associated Press (2026)

Pada 2022, pemerintah RDK meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Rwanda dan menerima pengerahan EACRF (Voice of America 2022). Pada 2023, pemerintah RDK beralih kepada dukungan SAMIDRC setelah menilai EACRF tidak efektif menekan M23 (SADC 2024). Pada 2025, pemerintah memperluas pendekatan melalui Perjanjian Washington dan proses Doha (Qatar Ministry of Foreign Affairs 2025). Pada April 2026, pemerintah meninjau pelaksanaan

perjanjian melalui komite pengawasan (U.S. Department of State 2026). Pada Juni 2026, pemerintah menggugat Rwanda di Mahkamah Internasional (ICJ 2026).

BAB 3

ANALISIS KARAKTERISTIK *NEW WARS* DALAM PERANG M23 DAN PEMERINTAH RDK

3.1 Analisis Aktor Konflik dalam Perspektif *New Wars*

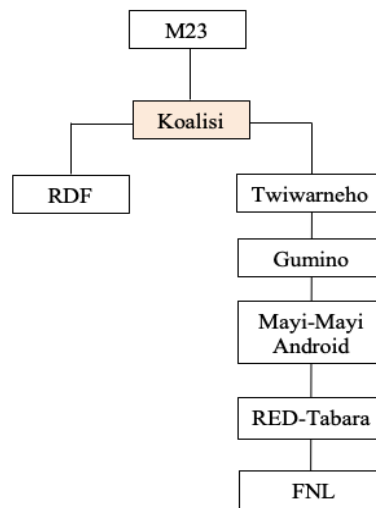
Analisis aktor akan digunakan untuk mengawali pembahasan ini karena dalam konsep *new wars* terkait aktor, perang tidak hanya dijalankan antara negara vs negara melainkan dalam perangnya terdapat kombinasi aktor negara vs non-negara. Adapun cakupan aktor non-negara yang dimaksud adalah jihadis, angkatan bersenjata reguler, kontraktor keamanan swasta, tentara bayaran, penguasa perang, paramiliter, dll (Kaldor 2013, 2). Oleh karena itu, pembahasan mengenai aktor tidak hanya menjelaskan siapa yang berperang, tetapi juga bagaimana aktor-aktor tersebut membentuk jejaring koalisi, saling membutuhkan, dan ikut memengaruhi keberlanjutan konflik.

3.1.1 Jejaring Koalisi Aktor Utama dalam Perang M23 vs Pemerintah RDK

Tentara Nasional Rwanda atau RDF sering dikaitkan sebagai pendukung utama M23 dan memiliki hubungan penting dalam koalisi dengan kelompok tersebut. Pada fase awal kemunculan M23 tahun 2012, laporan *Immigration and Refugee Board of Canada* menyebutkan bahwa Rwanda berperan dalam memberikan dukungan militer, perekrutan, senjata, amunisi, intelijen, serta nasihat politik kepada M23 (IRB 2013). Bagi Rwanda, keberadaan M23 berkaitan dengan kepentingan keamanan dalam menghadapi ancaman FDLR, menjaga stabilitas perbatasan, serta mempertahankan pengaruh di wilayah strategis seperti Goma,

Rutshuru, Bunagana, Rumangabo, Masisi, Rubaya, dan Nyiragongo (Nichols 2025).

Grafik 3.2 Koalisi M23



Sumber: IRB (2013), Serwat (2026)

Perkembangan jaringan M23 semakin terlihat setelah pembentukan *Alliance Fleuve Congo* atau AFC pada 15 Desember 2023. AFC merupakan koalisi politik dan militer yang dipimpin Corneille Nangaa, sedangkan M23 menjadi kekuatan bersenjata utama dan menempati posisi penting dalam struktur kepemimpinannya. AFC memperluas jaringan pemberontakan dengan menggabungkan aktor politik, pembelot FARDC, dan kelompok bersenjata yang beroperasi di Kivu Utara serta Kivu Selatan. Pembentukan AFC memberi M23 keuntungan berupa perluasan legitimasi politik, tambahan anggota, dan kemampuan membangun pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasainya (Serwat 2026).

Perluasan AFC ke Kivu Selatan melibatkan Twirwaneho, Gumino, Mayi-Mayi Android, RED-Tabara, dan FNL. Twirwaneho merupakan kelompok bersenjata yang berkaitan dengan komunitas Banyamulenge di dataran tinggi Kivu

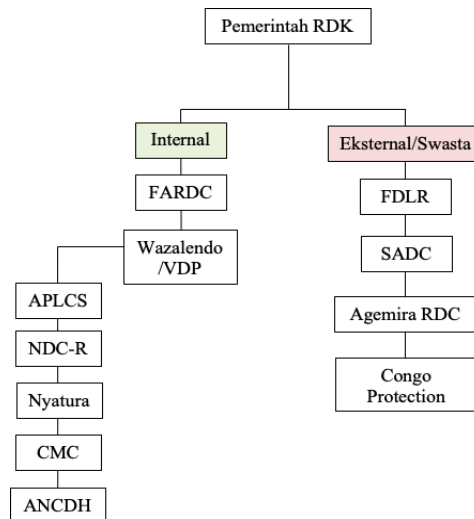
Selatan. Nama Twirwaneho berarti “kita mempertahankan diri” dalam bahasa Kinyamulenge. Kelompok ini membingkai keberadaannya sebagai upaya melindungi komunitas Banyamulenge dari serangan kelompok bersenjata dan milisi lokal. Di luar M23, Twirwaneho menjadi salah satu kelompok paling aktif dalam jaringan AFC dan terlibat dalam pertempuran melawan FARDC, Wazalendo, serta pasukan Burundi. Hubungan tersebut semakin terlihat setelah Presiden Twirwaneho, Freddy Kaniki Rukema, memperoleh posisi dalam struktur kepemimpinan AFC sebagai wakil koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan (Serwat 2026).

Gumino dan Mayi-Mayi Android juga memiliki basis rekrutmen dari komunitas Banyamulenge, sedangkan RED-Tabara dan FNL merupakan kelompok pemberontak Burundi yang menentang pemerintahan Burundi (Serwat 2026). Bergabungnya kelompok-kelompok tersebut memberikan AFC keuntungan berupa perluasan jaringan bersenjata, tambahan kekuatan lokal, serta kemampuan menjalankan operasi di dataran tinggi Kivu Selatan sebelum M23 dan RDF membangun kehadiran langsung yang kuat di wilayah tersebut (Serwat 2026).

Sebaliknya, kelompok-kelompok yang bergabung memperoleh manfaat berupa akses ke jaringan politik dan militer AFC yang lebih luas. Twirwaneho memperoleh pengakuan politik melalui masuknya pemimpinnya ke dalam struktur AFC, sedangkan kelompok lainnya dapat meningkatkan posisi tawar dalam perundingan dan kemungkinan pembagian kekuasaan setelah konflik. Manfaat tersebut tidak selalu berbentuk bantuan militer langsung, tetapi juga mencakup

legitimasi politik, perlindungan melalui koalisi, dan peluang untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya dalam agenda AFC (Serwat 2026).

Grafik 3.3 Koalisi Pemerintah RDK



Sumber: “Fighting Fire” (2025), SADC (2024), Investigative Journalism (2024)

Setelah jaringan koalisi M23 melalui AFC berkembang, Pemerintah RDK juga membangun koalisi untuk memperkuat posisi *Forces armées de la République démocratique du Congo* (FARDC). FARDC merupakan angkatan bersenjata nasional RDK sekaligus kekuatan militer utama pemerintah dalam menghadapi M23. Penguatan tersebut terlihat melalui kerja sama dengan Wazalendo atau *Volontaires pour la défense de la patrie* (VDP), yaitu sebutan bagi koalisi kelompok bersenjata lokal pro-pemerintah yang membantu operasi FARDC. Istilah “Wazalendo”, yang berarti patriot dalam bahasa Kiswahili, mulai dikenal pada akhir 2022 atau awal 2023, meskipun pembentukan koalisi telah terlihat dalam pertemuan Pinga pada 8-9 Mei 2022.

Pertemuan Pinga mengumpulkan sejumlah kelompok bersenjata yang sebelumnya saling bersaing dan menghasilkan pakta nonagresi untuk menghadapi M23 bersama FARDC. Koalisi tersebut meliputi APCLS, NDC-R, kelompok-kelompok Nyatura, CMC/FDP, dan ANCDH/AFDP. Wazalendo bukan organisasi tunggal dengan struktur yang sepenuhnya terpusat, melainkan jaringan kelompok bersenjata dengan kepemimpinan dan kepentingan masing-masing yang dipersatukan oleh perlawanan terhadap M23 (Congo Research Group dan Ebuteli 2025, 8).

Gambar 3.1 List Penerima Amunisi

N°	GP VDP	S/COMDT	TYPE MUN				
			X39mm	X54mm	Cart 12,7mm	Rog 40mm	Bombe 60mm
01	APCLS	KAMBUZI	48 760	14 931	1 600	50	25
02	APCLS	MBITE/IMANA	37 800	12 700		30	25
03	APCLS	GILBA	42 760	15 081	1 500	60	20
04	APCLS	ELIE	48 760	15 971	1 400	50	10
05	UPCRN	GENTIL	48 760	13 091		65	10
06	CLD	OBEDI	40 000	11 840		12	
07	FDDP	18h DEFENDER	48 760	21 931	1 986	65	20
08	FDDP	28h FIDEL	47 760	17 571	1 300	67	20
09	FDDP	38h DE GUERRE	48 760	81 971		55	20
10	ANCDH/AFDP	IGNACE	75 960	24 131	1 700	75	20
11	MMK	KIFUAFUA	20 800	7 080		06	
12	KIFUAFUA	KIRIKICHO	20 800	7 080		06	
13	APDC/RN	JESUS	26 800	11 960		08	
14	PARECO/FF	KIGINGI	26 800	15 600	1 100	14	10
15	PARECO	MAHORO	37 800	16 731	1 200	18	10
16	GIV	MAROCAIN	28 060	11 840		08	
17	FPDC/ML	LUSHEKE	2 800				
18	CMC	DOMI	109 760	23 935	9 120	110	24
19	CMC	TEBUKA	15 300	17 600	1 700	24	
20	UFDPC	MBOKANI	15 300	8 560			
21	MPA/APA	NYINZIMA	15 800	12 260		08	
22	FPA	MANYIMBA	7 800	6 800			
23	FAR IV	CYERIBIN	10 800	6 800			
24	UPLC	MAYANI	35 900	20 127		18	20
25	FPP/AP	KABIDON	35 800	15 600	1 600	12	10
26	NDC/R	GUIDON	39 800	20 139	1 500	40	10
27	CMC	RAPIDE	30 300	14 600		08	10
28	UPLC	CHARLES	21 800	6 800			
29	UPCRN	KIDJOU	10 000	6 800			
30	CNC	RIGABO	28 300	16 000		08	10
31	APCLS	NGOWA	15 800	6 800			
32	VDP (ITURI)	OLIVIER	9 000			24	10
Stock en Reserve			66.000	8 800	0	27	0
TOTAL GEN			1 120.400	790.280	25 706	668	284

Sumber: "Fighting Fire" 2025

FARDC yang posisinya merupakan aktor utama pada kubu pemerintah RDK, sangat menggantungkan serangannya kepada kelompok bersenjata lokal. Ketergantungan ini muncul karena FARDC membutuhkan pasukan tambahan untuk menahan M23 dalam invasinya ke wilayah-wilayah strategis seperti

Rutshuru, Masisi, dan sekitar Goma. Dalam hal ini, pemerintah RDK memanfaatkan koalisi dengan Wazalendo/VDP, karena kelompok ini dapat berfungsi sebagai garis depan ketika FARDC melemah. Bagi Wazalendo, berkoalisi dengan pemerintah RDK dapat membawa keuntungan tambahan, karena mereka menerima lebih dari 1,1 juta amunisi kaliber 7,62x39 mm untuk senapan jenis AK-47 dan 0,8 juta amunisi kaliber 7,62x54 mm untuk senapan mesin jenis PKM (hanya untuk periode Januari hingga April 2024), peralatan militer, serta kemungkinan untuk masuk ke dalam struktur RAD (Congo Research Group dan Ebuteli 2025, 25).

Kubu pemerintah RDK tidak hanya melibatkan aktor internal, tetapi juga aktor eksternal dan kelompok bersenjata lain. Salah satunya adalah FDLR, yang kembali menjadi sekutu taktis pemerintah RDK setelah M23 aktif kembali pada 2021. FDLR beberapa kali dilaporkan melatih anggota koalisi pro-pemerintah. Melalui koalisi ini, FDLR memperoleh dukungan dari FARDC, CMC, dan FDDP untuk melanjutkan kegiatan ekonomi ilegal serta meningkatkan perekrutan anggota setelah melemah akibat operasi gabungan RDF dan FARDC (Congo Research Group dan Ebuteli 2025, 19). FDLR juga menerima bantuan dari FARDC berupa amunisi, seragam, dan sepatu bot bagi para pejuangannya di desa Kazaroho (Human Rights Watch 2022).

Keterlibatan aktor eksternal juga terlihat melalui SADC, yaitu organisasi regional negara-negara Afrika bagian selatan yang bergerak dalam bidang pembangunan, integrasi kawasan, perdamaian, dan keamanan. SADC membentuk *SADC Mission in the Democratic Republic of Congo* (SAMIDRC), yaitu misi

militer regional yang dikerahkan pada 15 Desember 2023 untuk membantu Pemerintah RDK menghadapi kelompok bersenjata di wilayah timur. Misi ini terdiri atas pasukan dari Afrika Selatan, Malawi, dan Tanzania. Bagi SADC, pengerahan SAMIDRC menunjukkan upaya kawasan untuk memperkuat stabilitas regional serta mendukung perdamaian, keamanan jangka panjang, pembangunan berkelanjutan, dan kemakmuran di RDK (SADC 2024).

Pemerintah RDK juga bekerja sama dengan Agemira RDC dan Congo Protection sebagai perusahaan atau kontraktor militer swasta yang memberikan jasa keamanan, pelatihan, logistik, dan dukungan teknis kepada FARDC. Agemira RDC merupakan perusahaan yang dipimpin oleh pengusaha Prancis Olivier Bazin dan berfokus pada pemeliharaan armada udara, dukungan logistik, intelijen, serta pemberian nasihat militer. Sementara itu, Congo Protection dipimpin oleh Horațiu Potra, mantan anggota Legiun Asing Prancis asal Rumania, yang merekrut mantan tentara dan aparat keamanan untuk ditempatkan di RDK (Investigative Journalism for Europe 2024). Personel perusahaan tersebut dilaporkan menerima bayaran sekitar 5.000 hingga 6.000 dolar AS/bulan, bergantung pada pengalaman dan tingkat senioritasnya (The Guardian 2025).

Kerja sama dengan FARDC memberikan Agemira RDC kontrak dan akses operasional dalam sektor keamanan negara. Agemira RDC bersama Congo Protection dikontrak untuk membantu memelihara armada udara RDK dan melatih anggota FARDC. Agemira juga dilaporkan memberikan nasihat strategis, membantu perencanaan dan komando operasi FARDC di wilayah *Petit Nord*, melakukan pengintaian darat, merencanakan pasokan senjata, memberikan

pelatihan, serta mendukung kebutuhan logistik operasi militer (UN Group of Experts 2023, 13).

Congo Protection memperoleh keuntungan berupa kontrak keamanan, legitimasi operasional, dan akses untuk mengerahkan personelnya dalam operasi FARDC. Perusahaan tersebut memiliki sekitar 1.000 personel kontrak di RDK dan terlibat dalam pemberian pelatihan militer bersama Agemira RDC (Delanghe dan Matthysen 2023). Laporan Kelompok Ahli PBB pada poin ke-48 menyebutkan bahwa personel Congo Protection melatih unit FARDC, mengawasi serangan artileri terhadap posisi M23 dan RDF, serta mengangkut Pasukan Khusus FARDC dan pasukan Burundi atau FDNB menuju Kitchanga dan wilayah sekitarnya. Sejak Agustus 2023, sebanyak 80 personel Congo Protection juga dikerahkan untuk melindungi Bandara Kavumu di Bukavu dari kemungkinan serangan M23. Penugasan tersebut memberikan perusahaan akses langsung terhadap fasilitas dan wilayah strategis dalam konflik (UN Group of Experts 2023).

Keterlibatan berbagai aktor menunjukkan bahwa perang antara M23 dan Pemerintah RDK tidak hanya dijalankan oleh angkatan bersenjata reguler dan kelompok pemberontak. Pemerintah RDK mengandalkan FARDC serta membangun hubungan dengan Wazalendo, FDLR, SAMIDRC, dan perusahaan keamanan swasta. Sementara itu, M23 memperoleh dukungan RDF dan memperluas jaringan politik-militernya melalui AFC. Komposisi tersebut sesuai dengan karakteristik aktor dalam konsep *new wars*, yaitu perang yang melibatkan berbagai kombinasi jaringan aktor negara dan non-negara, termasuk tentara reguler, kelompok paramiliter, aktor eksternal, dan kontraktor keamanan swasta.

Keterlibatan tersebut juga memperlihatkan semakin kaburnya batas antara aktor negara dan non-negara, publik dan swasta, serta internal dan eksternal (Kaldor 2013, 2).

3.2 Tujuan Peperangan dalam Karakteristik *New Wars*

Tujuan perang dalam konsep *new wars* ditujukan untuk merebut kekuasaan negara, dan bukan sekedar menjalankan program politik yang memiliki kepentingan publik secara luas. Perang justru seringkali diperjuangkan atas nama identitas baik agama, etnis, maupun suku. Politik identitas dalam perang tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi, tetapi telah menjadi bagian dari perang itu sendiri (Kaldor 2013, 2-3). Politik identitas karena itu tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi dan perekrutan, tetapi juga menjadi dasar untuk membenarkan penggunaan kekerasan. Kelompok bersenjata kemudian berusaha mengubah kekuatan militernya menjadi dominasi politik melalui penguasaan wilayah, pembentukan pemerintahan lokal, dan pencarian pengakuan dari masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya (Péclard dan Mechoulam 2015, 7).

3.2.1 Tujuan Konflik dalam Kerangka *New Wars*

Politik identitas dapat melegitimasi kekuasaan karena narasi ini mengubah kekerasan kelompok bersenjata menjadi klaim perlindungan terhadap komunitas tertentu. Dalam konsep *new wars*, identitas etnis, agama, atau suku digunakan untuk memperoleh akses politik bagi kelompok tertentu, bukan untuk menjalankan program politik yang luas (Kaldor 2013, 2). Legitimasi kelompok bersenjata juga bergantung pada kemampuannya mengubah kekerasan menjadi dominasi yang

dianggap sah melalui pemerintahan dan pengakuan dari penduduk di wilayah yang dikuasainya (Péclard dan Mechoulam 2015, 7).

Sehingga dalam hal ini, sedari awal kemunculan kelompok M23, mereka telah menggunakan identitas "Tutsi" khususnya untuk melindungi komunitas berbahasa Kinyarwanda (*Rwandophone*) dari diskriminasi, ancaman kekerasan, dan ketidakamanan yang merajalela di wilayah timur RDK. Tentu saja, perlindungan etnis ini tidak digunakan oleh M23 tanpa alasan, tetapi untuk membangun legitimasi perjuangannya, karena mereka selalu dikaitkan dengan orang "asing" yang datang dari Rwanda, meskipun sebagian dari mereka telah menjadi bagian dari masyarakat RDK sejak lama (Walker 2024, 34-35).

Selain menggunakan narasi identitas, M23 mengaitkan tindakan bersenjata dengan pelaksanaan hasil Dialog Kampala. Dokumen tersebut memuat amnesti terbatas, pembebasan anggota yang ditahan, demobilisasi, reintegrasi sosial, kepulangan pengungsi, penyelesaian aset, dan kemungkinan perubahan M23 menjadi partai politik. Ketentuan tersebut menunjukkan upaya M23 memperoleh kembali status hukum dan akses politik. Akan tetapi, amnesti hanya berlaku bagi tindakan perang dan pemberontakan serta tidak mencakup kejahatan internasional dan perekrutan anak. Sehingga dalam hal ini, mantan kombatan diarahkan pada demobilisasi dan reintegrasi sosial, bukan otomatis kembali ke FARDC (Democratic Republic of the Congo 2013).

Penguasaan wilayah strategis semakin memperkuat tekanan militer M23 terhadap Pemerintah RDK. Rumangabo menjadi target penting karena menjadi salah satu instalasi militer utama FARDC di Kivu Utara. Bunagana juga strategis

karena terletak di perbatasan RDK dan Uganda (Africa Center for Strategic Studies 2022). Kendali atas kedua wilayah tersebut dapat melemahkan posisi FARDC sekaligus memperluas pengawasan M23 terhadap jalur perbatasan dan kawasan Rutshuru. Perluasan wilayah juga meningkatkan posisi tawar kelompok tersebut dalam mendorong perundingan politik dan tuntutan otonomi terhadap Pemerintah RDK (Muhumuza 2025).

Kendali atas wilayah diperkuat melalui pembentukan administrasi sipil di luar kewenangan Pemerintah RDK. M23 telah menunjuk Pangeran Mpambuka sebagai Administrator Rutshuru dan Salomon Bolingo sebagai wakilnya. Kelompok tersebut juga menempatkan pejabat di Bunagana, Kiwanja, dan Rubare (Amanya 2024). Administrasi ini mengatur keamanan, perpajakan, kegiatan ekonomi, dan mobilisasi politik. Pemungutan pajak serta pengawasan masyarakat terlihat pada administrasi paralel di kawasan pertambangan Rubaya (Radio Okapi 2024).

Bergabungnya M23 ke dalam *Alliance Fleuve Congo* (AFC) memperluas agendanya menuju perubahan politik nasional. Corneille Nangaa sebagai pemimpin kelompok politik telah memberikan wajah politik yang lebih beragam dan tidak hanya berpusat pada komunitas Tutsi. AFC juga menjadi wadah bagi M23 untuk membangun hubungan dengan kelompok yang menentang Pemerintahan Felix Tshisekedi (Muhumuza 2025). Koalisi tersebut mengangkat persoalan tata kelola negara, pengabaian wilayah timur, dan pemusatan kekuasaan di Kinshasa. AFC/M23 juga mendorong sistem federal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah (Lewis, Rolley dan Paravicini, 2025).

Tabel 3.1 Jumlah Tujuan M23 dalam Konflik

No.	Tujuan	Deskripsi singkat
1	Perlindungan identitas	Melindungi Tutsi Kongo dan Rwandophone.
2	Pelaksanaan kesepakatan	Amnesti, DDR, reintegrasi, dan pemulangan.
3	Pengakuan politik	Memperoleh posisi dalam perundingan.
4	Kontrol wilayah strategis	Menguasai pangkalan, kota, dan perbatasan.
5	Pemerintahan de facto	Membentuk administrasi dan memungut pajak.
6	Perubahan kekuasaan nasional	Memperluas agenda melalui AFC.

Sumber: Walker (2024), AP News (2025), Reuters (2025)

3.3 Metode Peperangan dalam Konsep *New Wars*

Mary Kaldor telah menjelaskan bahwasannya metode peperangan dalam konsep *new wars*, pertempuran di lapangan itu jarang terjadi dan cara untuk menaklukkan suatu wilayah cenderung menggunakan cara-cara politik seperti mengontrol populasi. Teknik umum yang biasa digunakan yaitu dengan cara melakukan pemindahan paksa penduduk yang memiliki identitas atau pandangan yang berbeda. Kekerasan memang sebagian besar ditujukan kepada masyarakat sipil daripada harus melawan pasukan musuh. Sehingga dalam bab ini akan menjelaskan terkait metode peperangan yang digunakan oleh kelompok M23 dalam konflik yang terjadi.

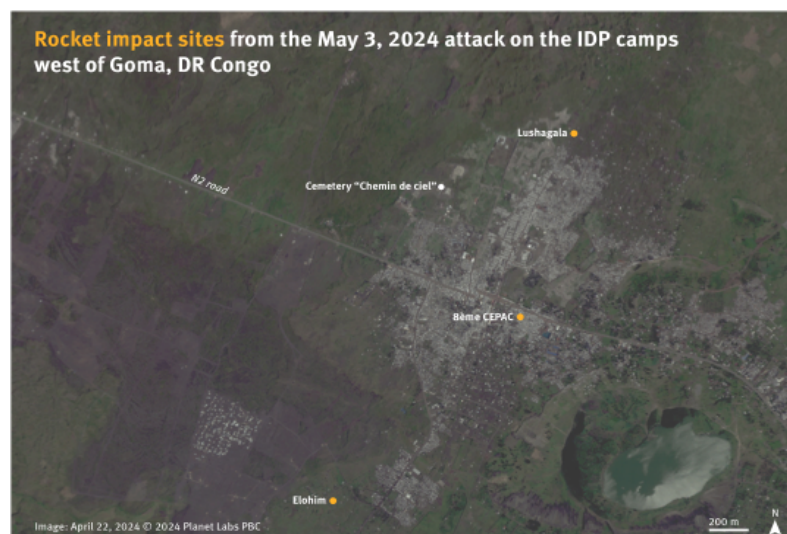
3.3.1 Metode Serangan M23 terhadap Warga Sipil

Kekerasan terhadap warga sipil semakin terlihat dalam serangan M23 di Kishishe, Bambo Centre, dan Bugina, wilayah Rutshuru, pada 21 hingga 30 November 2022. Serangan itu terjadi setelah bentrokan M23 dengan Mai-Mai, Nyatura, dan FDLR. Karena Kishishe berada di zona Bwito yang mayoritas dihuni komunitas Hutu dan dikenal berkaitan dengan basis FDLR, warga sipil sering

dicurigai sebagai pendukung musuh M23. M23 kemudian melakukan pencarian dari rumah ke rumah, membunuh pria dewasa tanpa membedakan status mereka, serta memperkosa perempuan yang disebut sebagai “istri FDLR” (Amnesty International 2023).

Kecurigaan terhadap warga sipil yang dianggap berhubungan dengan FDLR juga terlihat dalam peristiwa berikutnya di desa Kazaroho. Pada poin ke-67 laporan “*Final Report*” Kelompok Ahli PBB, M23 dilaporkan membunuh setidaknya 11 orang, termasuk seorang perempuan dan dua anak-anak, di desa Kazaroho sekitar 26 Februari 2023 saat mereka sedang memanen di ladang. Desa Kazaroho sebelumnya berada di bawah pengaruh FDLR dan dikenal sebagai bekas pusat sektor FDLR, sehingga korban dicurigai terkait dengan jaringan musuh M23. Beberapa rumah juga dibakar, termasuk yang dikaitkan dengan FDLR atau keluarganya (UN Group of Experts 2023, 18).

Gambar 3.2 Sasaran Raket Ke Kamp Pengungsi



Sumber: Human Right Watch (2024)

Memasuki tahun 2024, kekerasan terhadap warga sipil terlihat melalui penghukuman langsung, serangan ke ruang sipil, dan penargetan kamp pengungsi. M23 dan RDF menghukum warga sipil yang dicurigai bekerja sama dengan kelompok bersenjata lawan, terutama Hutu Kongo yang dianggap terkait dengan FDLR atau Nyatura, melalui eksekusi, penyiksaan, penghancuran desa, penjarahan, dan penahanan sewenang-wenang (Reyntjens 2025, 95). Dalam laporan Human Rights Watch, RDF dan M23 menembakkan artileri serta roket ke kamp pengungsi dan wilayah padat penduduk di sekitar Goma. Serangan pada 3 Mei 2024 di kamp Lac Vert dan Mugunga menewaskan sedikitnya 17 warga sipil, termasuk 15 anak-anak, serta melukai sedikitnya 35 orang (Human Rights Watch 2024).

Gambar 3.3 Peta Eksekusi Warga Sipil oleh M23

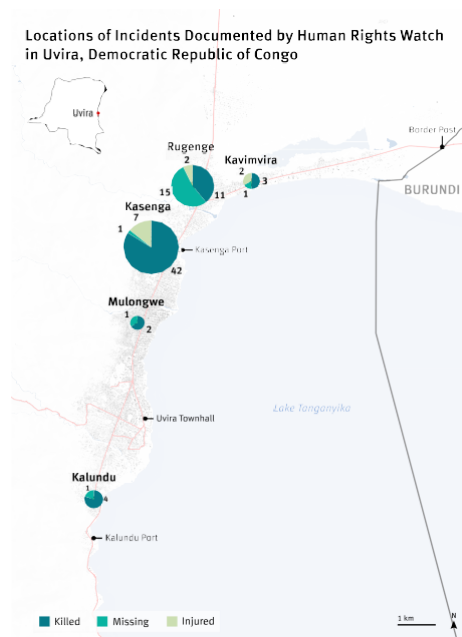


Sumber: Human Right Watch (2025)

Eskalasi berikutnya terlihat setelah M23 berhasil menguasai pusat kota strategis di provinsi Kivu Utara. Kekerasan terhadap warga sipil meningkat setelah M23 menguasai kota Goma pada 27 Januari 2025. Hingga 22-23 Februari 2025,

M23 mengeksekusi setidaknya 21 warga sipil di lingkungan Kasika, Goma, dan jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar. Rinciannya mencakup tujuh orang yang dieksekusi di sekitar barat kamp militer Katindo, 11 jenazah yang ditemukan di lokasi konstruksi dekat kamp tersebut, serta tiga laki-laki yang ditembak saat berusaha melarikan diri setelah ditangkap oleh M23. Selain itu, tiga tenaga medis menyebut bahwa lebih dari 50 jenazah dikumpulkan dari wilayah Kasika pada periode tersebut (Human Right Watch 2025).

Gambar 3.4 Jumlah Korban Warga Sipil



Sumber: Human Right Watch (2026)

Kekerasan terhadap warga sipil kemudian berlanjut dalam pendudukan kota Uvira dan praktik penahanan paksa di kamp yang dikendalikan M23 dan RDF. Setelah M23 dan RDF menguasai kota Uvira dari 10 Desember 2025 hingga penarikan mereka pada 17 Januari 2026, keduanya dilaporkan menembaki warga sipil yang melarikan diri, mengeksekusi orang setelah menuduh warga sipil sebagai

anggota atau memiliki berhubungan dengan milisi Wazalendo, memperkosa perempuan, dan menghilangkan paksa sejumlah warga. M23 dan RDF juga melakukan perekrutan paksa, penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, serta pelatihan militer terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, yang dibawa ke kamp Rumangabo dan Tshanzu. Di kamp tersebut, korban mengalami pemukulan, kekurangan makanan dan air, kerja paksa, serta hukuman berat ketika dianggap tidak patuh (Human Rights Watch 2026).

Tabel 3.2 Jumlah Metode M23 dalam Konflik

No	Metode Utama	Deskripsi Singkat
1	Pembunuhan dan eksekusi	Membunuh warga sipil yang dicurigai mendukung kelompok bersenjata lawan.
2	Kekerasan seksual	Memperkosa perempuan sebagai bentuk penghukuman, intimidasi, dan kontrol terhadap komunitas.
3	Penyiksaan dan pemukulan	Melakukan kekerasan fisik serta hukuman berat terhadap warga yang ditahan.
4	Pembakaran dan penghancuran	Membakar rumah serta menghancurkan permukiman atau desa yang dianggap terkait dengan lawan.
5	Serangan ke ruang sipil	Menembakkan artileri dan roket ke kamp pengungsi serta wilayah padat penduduk.
6	Penahanan dan penghilangan paksa	Menahan warga tanpa dasar hukum dan menghilangkan keberadaan sebagian korban.
7	Penembakan wargayang melarikan diri	Menyerang warga sipil ketika mereka berusaha meninggalkan wilayah konflik.
8	Perekrutan dan pelatihan militer paksa	Memaksa warga, termasuk anak-anak, untuk direkrut dan mengikuti pelatihan militer.
9	Kerja paksa	Memaksa warga bekerja di kamp atau wilayah yang berada di bawah kendali M23 dan RDF.

Sumber: Amnesty International (2023), UN Group of Experts (2023), Human Rights Watch (2024, 2025, 2026), dan Reyntjens (2025).

3.4 Ekonomi Konflik dan Mekanisme Pembiayaan Perang

Menurut konsep *new wars*, sumber pendanaan konflik bersenjata berasal dari metode kriminal seperti penjarahan, pungutan pajak, dukungan diaspora, penyeludupan barang ilegal, atau komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi. Konsep ini juga menekankan bahwa dalam perang baru, sulit untuk membedakan apakah aktor bersenjata menggunakan kekerasan politik untuk mencari keuntungan ekonomi, atau apakah mereka menggunakan kegiatan ekonomi predator untuk membiayai tujuan politik mereka (Kaldor 2013, 3). Dengan demikian, ekonomi dalam perang ini bukan hanya "pendapatan tambahan" bagi para pelaku yang terlibat (terutama kelompok bersenjata), tetapi juga merupakan bagian dari alasan mengapa "konflik sulit dihentikan".

3.4.1 Sumber Pembiayaan Kelompok Bersenjata M23

Salah satu sumber pendanaan utama M23 berasal dari pungutan pajak terhadap individu, rumah tangga, dan pelaku usaha kecil di wilayah yang mereka kuasai. Di Kitshanga, pemilik restoran, kantin, salon kecantikan, tempat pengisian daya ponsel, dan pedagang kecil diwajibkan membayar 1.000 franc Kongo setiap hari. Selain itu, seorang pejabat dari Bambu menjelaskan bahwa M23 juga memungut 50.000 franc Kongo dari setiap toko di Kitshanga untuk periode tiga bulan (IPIS, ASSODIP, dan DIIS 2024, 25).

Gambar 3.5 Peta Pos M23



sumber: Le M23 Version 2 (2024)

Gambar 3.6 Tanda Terima Kendaraan Fuso

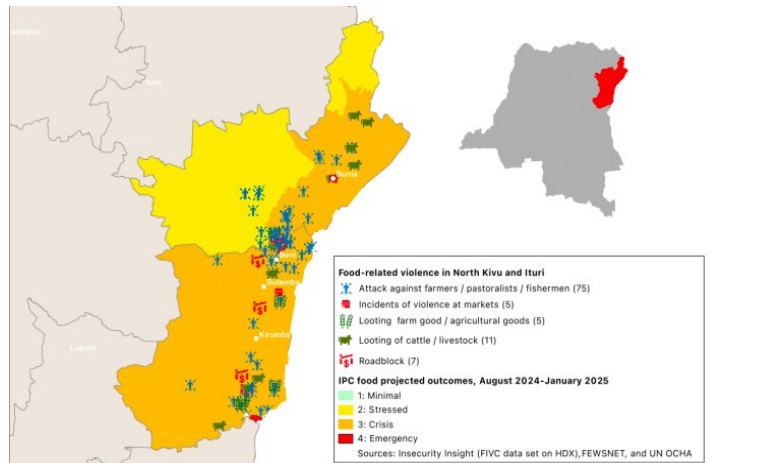


Sumber: Le M23 version 2 (2024)

Pengendalian jalan nasional kemudian menjadi sumber utama pendapatan, karena M23 mampu memungut tol dari mobil dan pedagang lokal yang melintasi wilayahnya. Di jalan Sake-Kilolirwe-Kitshanga, biaya tol yang dikenakan pada truk dan sepeda motor diperkirakan sekitar 69.500 dolar AS per bulan untuk M23 (IPIS,

ASSODIP, dan DIIS 2024, 5). Sementara itu, di jalan Kiwanja-Bunagana, M23 memungut sekitar 320-700 dolar Amerika untuk truk dan 10.000-15.000 franc Kongo untuk sepeda motor setiap kali lewat (IPIS, ASSODIP, dan DIIS 2024, 29).

Gambar 3.7 Peta Kekerasan Terkait Pangan



Sumber: Insecurity Insight (2025)

Kerja paksa, penyitaan hasil panen, dan pungutan ilegal menjadi bagian dari sumber pembiayaan M23. Kelompok ini memaksa warga sipil mengangkut amunisi, membawa barang jarahan, memperbaiki jalan, dan bekerja di ladang melalui praktik *salongo*. Warga yang tidak dapat membuktikan keikutsertaan dalam *salongo* dapat ditahan dan dipaksa membayar 20 dolar AS. M23 juga menyita hasil panen, memungut kacang atau jagung dari pemilik tanah, serta mengeksploitasi arang, kayu, produk hutan, dan produksi *makala* melalui pajak 10 hingga 30 dolar AS per tungku (IPIS, ASSODIP, dan DIIS 2024, 25-27). *Insecurity Insight* juga melaporkan bahwa pos pemeriksaan dan pajak ilegal kelompok bersenjata, termasuk M23, mengganggu rantai pasok, menaikkan harga pangan, serta menghasilkan sekitar 40.000 hingga 50.000 dolar AS per bulan dari pos Mushaki dan Kilolirwe (Insecurity Insight 2025).

Gambar 3.8 Tarif Harga Mineral oleh M23

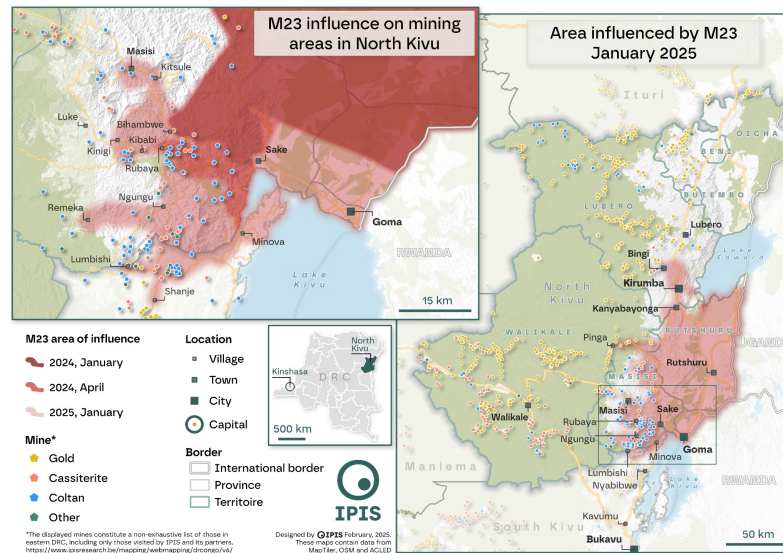


coltan (T.A)	: 4\$
Cassiterite (sno ²)	: 2\$
Déchet	: 2\$
Orifame	: 2\$
Kuars	: 1\$
Monazite	: 0.07\$
Bellule	: 0.05\$
NIOBIUM	: 1.23\$

Sumber: Global Witness (2026)

Pengaruh M23 di wilayah Rubaya semakin memperkuat kontrol atas ekonomi sehari-hari dan jalur distribusi, terutama sumber daya mineral sebagai sumber pendanaan bagi kelompok tersebut. Rubaya adalah wilayah penting karena berkontribusi lebih dari 15% pasokan tantalum dunia, sebuah mineral yang diekstraksi dari koltan dan digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik, seperti ponsel dan komputer (Banchereau 2024). Menurut laporan para ahli PBB yang disusun oleh Global Witness, setidaknya 120 ton coltan/bulan diselundupkan dari Rubaya ke Rwanda, menyebabkan kontaminasi besar pada rantai pasokan mineral di Kawasan Great Lakes. Selain itu, M23 juga memanfaatkan koltan dari Rubaya dengan mengendalikan jalur transportasi, menguasai area pertambangan, dan menghasilkan pendapatan yang diperkirakan mencapai 800.000 dolar AS/bulan (Global Witness 2026).

Gambar 3.9 Peta Pengusahaan Area Tambang M23



Sumber: IPIS (2025)

Dari peta tersebut, bisa dilihat bahwasannya perluasan kontrol M23 di provinsi Kivu Utara menunjukkan kalau kelompok ini tidak hanya mendominasi wilayah tersebut secara militer, tetapi juga mengelola administrasi dan ekonomi lokal melalui para koalisinya. Karena pada awal kebangkitannya, M23 mendapatkan pendapatan dari pos pemeriksaan, pajak perdagangan, dan pemungutan dari mineral yang diselundupkan ke Rwanda. Penguasaan langsung atas tambang-tambang baru meningkat sejak akhir April 2024, ketika M23 memasuki daerah-daerah kaya coltan di Masisi dan Kalehe (IPIS 2025).

Tabel 3.3 Sumber Pendanaan M23

No.	Sumber pembiayaan	Mekanisme dan lokasi	Estimasi pendapatan
1	Pajak pelaku usaha kecil	Pajak usaha kecil di Kitshanga.	1.000 franc Kongo per hari & 50.000 franc Kongo per toko untuk tiga bulan.
2	Tol jalan dan pungutan kendaraan	Tol kendaraan di jalur Sake-Kilolirwe-Kitshanga dan Kiwanja-Bunagana.	Sekitar 69.500 dolar AS per bulan, 320-700 dolar AS per truk, 10.000-15.000 franc Kongo per sepeda motor.
3	Kerja paksa dan denda salongo	Kerja paksa dan denda salongo di wilayah M23.	Denda 20 dolar AS bagi warga yang tidak dapat membuktikan keikutsertaan.
4	Penyitaan hasil pertanian	Penyitaan hasil panen di wilayah M23.	Pembayaran berupa hasil panen; nilainya tidak dirinci.
5	Pajak hasil hutan dan produksi makala	Pajak arang dan hasil hutan di wilayah M23.	10-30 dolar AS per tungku.
6	Penguasaan koltan Rubaya	Kontrol tambang dan jalur koltan di Rubaya.	Sekitar 120 ton koltan per bulan; pendapatan diperkirakan 800.000 dolar AS per bulan.

Sumber: IPIS, ASSODIP, dan DIIS (2024), Banchereau (2024), serta Global Witness (2026).

3.4.2 Sumber Pembiayaan Ilegal FARDC dan Kelompok Wazalendo

Keberlangsungan operasi FARDC dan Wazalendo di wilayah konflik tidak seluruhnya ditopang oleh anggaran resmi pemerintah. Wazalendo memperoleh pendapatan melalui pungutan jalan, pajak keamanan, dan denda yang dibebankan kepada masyarakat (IPIS, ASSODIP, dan DIIS 2024, 34). FARDC juga memanfaatkan pos pemeriksaan sebagai sumber pungutan di luar mekanisme resmi negara (Insecurity Insight 2025, 15). Cara memperoleh pendapatan tersebut menunjukkan pola pembiayaan *new wars*, ketika melemahnya penerimaan pajak

negara yang telah membuka ruang bagi praktik ekonomi predator untuk menopang aktor perang (Kaldor 2013, 3).

Sehingga dalam konflik ini, kelompok Wazalendo mendirikan setidaknya enam pos pemeriksaan di wilayah Binza, Bwisha, Rutshuru, khususnya di sepanjang jalan Ngwenda-Ishasha. Pos-pos ini digunakan untuk memungut pajak tanpa kuitansi dari pengendara sepeda motor, penumpang, dan petani yang membawa hasil panen (IPIS, ASSODIP, dan DIIS 2024, 34). Praktik serupa juga terlihat di jalur Goma-Rubaya, ketika Wazalendo meminta pembayaran sekitar 32.000 hingga 40.000 franc Kongo kepada pelintas. Di Nyiragongo, mereka juga memaksa petani membayar “jeton keamanan” sebesar 3.000 franc Kongo/bulan agar dapat mengakses ladang (IPIS 2026).

FARDC sebagai institusi negara juga terlibat dalam praktik pungutan ilegal di Provinsi Ituri dan Kivu Utara. Laporan dari *Insecurity Insight* menyatakan bahwa FARDC, kelompok bersenjata non-negara, dan otoritas lokal mengoperasikan sejumlah pos pemeriksaan jalan yang digunakan sebagai mekanisme pemungutan pajak ilegal dan sumber pendapatan. Di teritori Masisi dan Walikale, provinsi Kivu Utara, sekitar 44% pos pemeriksaan berada di bawah kendali FARDC. Sementara itu, pos pemeriksaan lainnya dioperasikan oleh kelompok bersenjata, seperti Wazalendo, serta otoritas adat setempat yang secara rutin memeras pedagang dan petani (Insecurity Insight 2025, 15). Seorang tokoh masyarakat bahkan menyatakan bahwa pos pemeriksaan di Kibumba memperkaya Wazalendo dan beberapa perwira FARDC (IPIS 2026).

Tabel 3.4 Sumber Pembiayaan Ilegal FARDC dan Wazalendo

No.	Sumber pembiayaan	Mekanisme dan lokasi	Estimasi pendapatan
1	FARDC pungutan jalan	Pos militer di Masisi dan Walikale	500-1.000 Fc per orang per pos
2	FARDC pungutan mineral	Penyeberangan Sungai Osso	500 Fc per orang
3	FARDC bagian kasiterit	Sungai Osso, per karung 50 kg	2.000 Fc per karung
4	FARDC Wazalendo pos gabungan	Jalur Goma-Ngungu, Goma-Rubaya, dan Goma-Masisi	32.000-50.000 Fc per orang per perjalanan
5	Wazalendo pajak Vodo	Nyamilima, Binza, dan Rutshuru	Lebih dari 20.000 dolar AS per bulan; 1.000 Fc per warga dewasa per bulan
6	Wazalendo jeton keamanan	Akses ladang di Nyakagina, Nyiragongo	3.000 Fc per orang per bulan
7	Wazalendo denda penahanan	Ki Boro, Nyiragongo	100.000 Fc per orang
8	Wazalendo pungutan jalan	Jalur Ngwenda-Ishasha, Rutshuru	1.000 Fc per orang per pos

Sumber: Radio Okapi (2023), IPIS, ASSODIP, dan DIIS (2024), IPIS (2026)

Pajak ilegal yang dipungut oleh kelompok bersenjata, FARDC, dan Wazalendo berdampak pada ekonomi masyarakat secara luas. Pos pemeriksaan ilegal dan pungutan terhadap barang maupun orang mengganggu rantai pasok, meningkatkan biaya distribusi, serta menaikkan harga pangan. Beban terbesar dialami petani dan pedagang kecil karena mereka harus membayar biaya tambahan untuk mengakses lahan, membawa hasil panen ke pasar, atau melewati jalur yang dikuasai aktor bersenjata. Pungutan tersebut dapat mencapai 25% hingga 50% dari total biaya transportasi pangan, sehingga menekan keuntungan petani dan membuat

kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau masyarakat lokal (Insecurity Insight 2025, 15-16).

Sehingga, pembahasan dalam bab ini menjelaskan bahwa perang antara M23 dan Pemerintah RDK tidak hanya berlangsung melalui pertempuran langsung antara M23 dan FARDC. Perang ini juga terlihat dari rumitnya hubungan antaraktor, perubahan tujuan konflik, metode kekerasan, serta mekanisme pembiayaan perang. M23 mampu memposisikan diri sebagai aktor bersenjata yang membangun pengaruh politik, mengelola wilayah, dan memanfaatkan kondisi sosial masyarakat. Dari sudut pandang Pemerintah RDK, perang ini menjadi tantangan besar karena negara tidak hanya menghadapi ancaman militer, tetapi juga lemahnya kontrol atas wilayah, populasi, sumber daya ekonomi, serta pelanggaran oleh FARDC beserta koalisi Wazalendo yang juga turut melakukan pemungutan ilegal.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama 30 tahun, Republik Demokratik Kongo terjebak dalam konflik yang dipicu oleh perang 1996-1997 dan dilanjutkan oleh perang 1998-2003. Meskipun Perjanjian Pretoria 2002 adalah salah satu upaya untuk mengakhiri perang, namun wilayah timur RDK tetap tidak stabil akibat lemahnya kontrol negara dan banyaknya kelompok bersenjata. Serta akibat kegagalan dari perjanjian damai 2009 antara pemerintah dan CNDP memicu munculnya M23 pada 2012, yang menjadi aktor bersenjata dengan dukungan Rwanda.

Konsep *new wars* menjelaskan bahwa perang sering muncul pada wilayah di mana otoritas negara melemah akibat keterbukaan terhadap dunia luar. Untuk menganalisis konflik yang terjadi di RDK melalui empat faktor, yaitu aktor, tujuan, metode, dan bentuk-bentuk keuangan. Dari sisi aktor, perang antara M23 dan pemerintah RDK tidak hanya melibatkan negara dan kelompok pemberontak. Konflik ini juga melibatkan FARDC, kelompok bersenjata lokal, koalisi Wazalendo, pihak swasta seperti Agemira DRC dan Congo Protection, serta dukungan eksternal dari negara-negara lain, seperti Rwanda.

Melihat dari faktor tujuan, M23 menggunakan isu perlindungan komunitas Tutsi Kongo dan populasi berbahasa Rwanda sebagai dasar legitimasi politik, sambil mengendalikan wilayah-wilayah strategis untuk memperkuat posisi negosiasinya. Sedangkan metodenya, M23 tidak hanya menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi FARDC, tetapi juga melakukan pemindahan paksa

penduduk di daerah yang dianggap berkolaborasi dengan FDLR atau memiliki hubungan dengan beberapa kelompok Hutu. Terakhir bentuk-bentuk keuangan, M23 telah memperoleh pendanaan hasil dari melakukan pungutan pajak ilegal, mengeksploitasi tantalum, hingga melakukan penjarah terhadap hasil panen warga sipil.

4.2 Rekomendasi

Penyelesaian konflik ini tidak dapat dilakukan hanya melalui operasi militer terhadap M23, karena munculnya dan keberlangsungan kelompok ini tidak hanya terkait dengan ancaman keamanan, tetapi juga berakar pada kegagalan pemerintah RDK untuk melaksanakan kesepakatan 23 Maret 2009, terutama terkait dengan integrasi mantan pejuang CNDP ke dalam FARDC, perlindungan etnis Tutsi, dan reorganisasi keamanan di wilayah timur RDK. Oleh karena itu, pemerintah RDK harus melakukan reformasi serius terhadap FARDC dengan meningkatkan rantai komando, memantau agen dengan ketat, mengintegrasikan mantan pejuang untuk mencegah pembentukan kelompok bersenjata baru, dan menghukum dengan keras tentara yang terlibat dalam tindakan pemungutan pajak. Reformasi angkatan bersenjata RDK sangat penting karena negara tidak akan mampu menetralkan kekuatan M23 jika angkatan bersenjata tetap lemah. Tidak hanya itu, tetapi pemerintah RDK juga harus memperkuat mekanisme tanggung jawab hukum bagi pelaku kejahatan perang dan pelanggaran hak-hak sipil, baik melalui pengadilan nasional maupun kerja sama dengan lembaga internasional seperti ICC.

DAFTAR PUSTAKA

- The Africa Center for Strategic Studies. 2022. "Rwanda and the DRC at Risk of War as New M23 Rebellion Emerges: An Explainer." <https://africacenter.org/spotlight/rwanda-drc-risk-of-war-new-m23-rebellion-emerges-explainer/>.
- Afriye, Frederick A. 2025. "Congo: Protracted Social Conflict and the M23 Rebellion. Analyzing the Ongoing Struggle Between the DRC Military and Rebels." no. 52 (July), 3-31. 10.24193/csq.52.1.
- Agence France-Presse. 2022. "Kenyan Peacekeepers Arrive in DR Congo's Volatile East." VOA. <https://www.voanews.com/a/kenyan-peacekeepers-arrive-in-dr-congo-s-volatile-east/6831860.html>.
- Ahmed, Lassad B. 2021. "RDC : l'armée reprend le contrôle des localités investies par le M23 au Nord-Kivu (officiel)." Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/rdc-l-arm%C3%A9e-reprend-le-contr%C3%B4le-des-localit%C3%A9s-investies-par-le-m23-au-nord-kivu-officiel/2415952>.
- Ajibode, Oluwatimileyin S., and Professor S. Dauda. n.d. "Rebel Governance and Resource Control: The M23 Movement's Quasi-State Structures in Eastern DRC." *IRE Journals* 9 (2): 616. <https://www.irejournals.com/paper-details/1710153>.
- Amanya, Samuel. 2025. "M23 President Appoints Administrative Leaders in North Kivu." Uganda Radio Network. https://ugandaradionetwork.net/story/m23-president-appoints-administrative-leaders-in-north-kivu?_cf_chl_rt_tk=2L9sD.xOMbOQB4mNyt4R4WdH1_6y6MdEW7sRDlnnxIo-1781095999-1.0.1.1-K9jTieorKtvZD_FbDLozZIk63MVSHfLe6obdw0Js7Y8.
- Amnesty Internasional. 2025. "DRC: "They Said We Should Die" M23 and Wazalendo Abuses in Eastern Congo." Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/0145/2025/en/>.
- Angelo, Michael D., Yale Ford, and Liam Karr. 2026. "Ethiopia-Sudan Tensions Rise over RSF Khartoum Strikes; TPLF Asserts Control of Tigray; US Sanctions on Kabila Could Backfire: Africa File, May 7, 2026." Critical Threats. https://www.criticalthreats.org/analysis/sudan-rsf-saf-ethiopia-tplf-drc-m23-rwanda-mali-jnim-fla-russia-madagascar-france-africa-file-may-7-2026?_hsmi=417791770.
- Asanzi, Philippe, and Remadji Hoinaty. 2024. "The revived Luanda Process – inching towards peace in east DRC?" ISS. <https://issafrica.org/iss-today/the-revived-luanda-process-inching-towards-peace-in-east-drc>.
- ASSODIP, DIIS, and IPIS. 2024. "Le M23 « version 2 » : Enjeux, motivations, perceptions et impacts locaux." IPIS. <https://ipisresearch.be/fr/publication/le-m23-version-2-enjeux-motivations-perceptions-et-impacts-locaux/>.
- Banchereau, Mark. 2024. "Rebel Group in Congo generates \$300,000 monthly in seized mining area, UN Official says." AP News. https://apnews.com/article/congo-mining-m23-un-security-council-b11207ba887b352d702c3e4603d0c891?utm_source=copy&utm_medium=share.

- Campeanu, Andreea. 2024. "European Mercenaries in Africa - IJ4EU." Investigative Journalism for Europe. <https://investigativejournalismforeu.net/projects/european-mercenaries-in-africa/>.
- Congo Research Group and Ebuteli. 2025. "Fighting Fire with Fire in Eastern Congo: The Wazalendo Phenomenon and the Outsourcing of Warfare." *Ebuteli*, May 16, 2025. <https://ebuteli.org/publications/rapports/fighting-fire-with-fire-in-eastern-congo-the-wazalendo-phenomenon-and-the-outsourcing-of-warfare>.
- Cordell, Dennis D., B. M. Wiese, R. Lemarchand, and N. Payanzo. 2026. "Democratic Republic of the Congo - Mobutu's Regime, Colonialism, Conflict." Britannica. <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Mobutus-regime>.
- Critical Threats. 2025. "The Africa File provides regular analysis and assessments of major developments regarding state and nonstate actors' activities in Africa that undermine regional stability and threaten US personnel and interests." Critical Threats. <https://www.criticalthreats.org/briefs/africa-file/afc-m23-organizational-network/>.
- Delanghe, Alexei, and Ken Matthysen. 2023. "M23 crisis flares again in North Kivu: context, dynamics and risks." IPIS. <https://ipisresearch.be/weekly-briefing/m23-crisis-flares-again-in-north-kivu-context-dynamics-and-risks/>.
- Democratic Republic of the Congo. 2003. "Global and inclusive agreement on transition in the Democratic Republic of the Congo : signed in Pretoria (Republic of South Africa) on 16 December 2002." <https://lawcat.berkeley.edu/record/666574>.
- Democratic Republic of the Congo. 2013. "Declaration on the commitments of the 23 March Movement at the conclusion of the Kampala Dialogue." *UN Digital Library*, December 13, 2013. <https://digitallibrary.un.org/record/762880?v=pdf>.
- Democratic Republic of the Congo. 2013. "Letter dated 13 December 2013 from the Permanent Representative of the Democratic Republic of the Congo to the United Nations addressed to the President of the Security Council." *UN Digital Library*. <https://digitallibrary.un.org/record/762880?ln=en&v=pdf>.
- Demoratic Republic of The Congo. 2009. "Peace Agreement Between The Government And The CNDP (And The Implementation Plan)." *UN Peacemaker*, March 23, 2009. <https://peacemaker.un.org/sites/default/files/document/files/2024/05/cd090323peace20agreement20between20the20government20and20the20cndp.pdf>.
- DRC in Qatar. 2025. "Signing of the Doha Framework for Peace between the Government of the Democratic Republic of the Congo and the Congo River Alliance (M23 Movement)." <https://drcinqatar.org/signing-of-the-doha-framework-for-peace-between-the-government-of-the-democratic-republic-of-the-congo-and-the-congo-river-alliance-m23-movement/>.
- "DR Congo: Resurgent M23 Rebels Target Civilians." 2022. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/07/25/dr-congo-resurgent-m23-rebels-target-civilians>.
- "DR Congo: Rwandan Forces, M23 Rebels Shell Civilians." 2024. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2024/09/26/dr-congo-rwandan-forces-m23-rebels-shell-civilians>.

- Ford, Yale, Michael DeAngelo, and Liam Karr. 2025. "M23 Withdraws From Uvira; Saudi-UAE Red Sea Competition: Africa File." Critical Threats. <https://www.criticalthreats.org/analysis/m23-withdraws-from-uvira-saudi-uae-red-sea-competition-al-shabaab-attacks-mogadishu-rsf-genocide-el-fasher-africa-file-december-18-2025>.
- Gil, Manuel M. 2012. "The M23 and eastern D.R. Congo: An intractable problem or an opportunity to engage?" Think Tank European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO-DEVE_SP%282012%29491460.
- Global Witness. 2026. "Who buys Rwanda's conflict coltan?" Global Witness. <https://globalwitness.org/en/campaigns/transition-minerals/who-buys-rwandas-smuggled-coltan-the-global-journey-of-conflict-coltan-from-drc-to-the-worlds-electronics/>.
- Government of the Democratic Republic of the Congo. 2013. "Outcome Documents From The Conclusion Of The Kampala Dialogue Between The Government Of The Democratic Republic Of The Congo And The M23." United Nations peacemaker. <https://peacemaker.un.org/en/node/8849>.
- The Guardian. 2025. "Supermarket guards, truck drivers and 'very big mistakes': the failed role of western mercenaries in the fall of Goma." <https://www.theguardian.com/global-development/2025/mar/14/failed-role-western-mercenaries-fall-of-goma-drc>.
- Hanai, Kazuyo. 2021. "Conflict minerals regulation and mechanism changes in the DR Congo." *Resources Policy* 74 (December). 10.1016/j.resourpol.2021.102394.
- Hoinaty, Remadji. 2023. "Eastern DRC peace processes miss the mark Deteriorating security in the Democratic Republic of the Congo raises questions about the Nairobi and Luanda processes." ISS. <https://issafrica.org/iss-today/eastern-drc-peace-processes-miss-the-mark>.
- Human Right Watch. 2012. "DR Congo: M23 Rebels Committing War Crimes Rwandan Officials Should Immediately Halt All Support or Face Sanctions." <https://www.hrw.org/news/2012/09/11/dr-congo-m23-rebels-committing-war-crimes>.
- Human Right Watch. 2022. "DR Congo: Army Units Aided Abusive Armed Groups Vetting, Demobilization Program Needed." <https://www.hrw.org/news/2022/10/18/dr-congo-army-units-aided-abusive-armed-groups>.
- Human Right Watch. 2026. "DR Congo: M23 Rebels Commit Atrocities in Eastern City." <https://www.hrw.org/news/2026/05/14/dr-congo-m23-rebels-commit-atrocities-in-eastern-city>.
- Human Right Watch. 2026. "'We Are Civilians!': Killings, Sexual Violence, and Abductions by the M23 and Rwandan Forces in Uvira, Democratic Republic of Congo | HRW." <https://www.hrw.org/report/2026/05/14/we-are-civilians/killings-sexual-violence-and-abductions-by-the-m23-and-rwandan>.
- Human Right Watch, Ida Sawyer, and Timo Muller. 2017. "'Special Mission' Recruitment of M23 Rebels to Suppress Protests in the Democratic Republic of Congo." Human Right Watch. <https://www.hrw.org/report/2017/12/04/special-mission/recruitment-m23-rebels-suppress-protests-democratic-republic>.

- ICJ. 2026. "The Democratic Republic of the Congo institutes proceedings against Rwanda." International Court of Justice. <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/202/202-20260626-pre-01-00-en.pdf>.
- Insecurity Insight. 2025. "Chronic Insecurity - How Armed Groups Undermine Food Security in Ituri and North Kivu Provinces, Democratic Republic of the Congo." *Reliefweb*, February 5, 2025. <https://reliefweb.int/node/4129882>.
- IOM UN Migration. 2025. "Saving lives and protecting people on the move Violence and Crisis." Global Data Institute Displacement Tracking Matrix. <https://dtm.iom.int/dtm-insights/april-2025-edition/data-update-violence-and-crisis-democratic-republic-congo>.
- IPIS. 2012. "Mapping Conflict Motivies: M23." IPIS. <https://ipisresearch.be/publication/mapping-conflict-motives-m23/>.
- IPIS. 2025. "The (new) M23 offensive on Goma: Why this long-lasting conflict is not only about minerals and what are its implications? – Q&A." International Peace Information Service. <https://ipisresearch.be/publication/the-new-m23-offensive-on-goma-why-this-long-lasting-conflict-is-not-only-about-minerals-and-what-are-its-implications-qa/>.
- IPIS. 2026. "The emergence of the Wazalendo in the fight against the AFC/M23 in North Kivu: Current situation, challenges and prospects." <https://ipisresearch.be/publication/the-emergence-of-the-wazalendo-in-the-fight-against-the-afc-m23-in-north-kivu-current-situation-challenges-and-prospects/>.
- IRB - Immigration and Refugee Board of Canada. 2013. "Democratic Republic of the Congo: The armed group M23 (Mouvement du 23 Mars), including its activities in Goma; the ethnic makeup of the group, its objectives, affiliated groups, recruitment methods and areas of operation; treatment of its members by state." <https://www.ecoi.net/en/document/1324343.html>.
- Kaldor, Mary. 2013. "In Defence of new wars." *Internasional Journal of Security and Development* 2 (1). 10.5334/sta.at.
- Kamale, Jean, and Mark Bancherau. 2026. "Congo files case against Rwanda at International Court of Justice." Associated Press News. <https://apnews.com/article/congo-rwanda-icj-genocide-m23-b08bf540d56a8588bd6fbfcc3f8b1ea6>.
- Kets, Evert, and Hugo d. vries. 2014. "Limits to supporting security sector interventions in the DRC." *Institute for Security Studies*, July 31, 2014. <https://issafrica.org/research/papers/limits-to-supporting-security-sector-interventions-in-the-drc>.
- Kibasomba, Roger. 2005. "Post-war defence integration in the Democratic Republic of the Congo." *Institute for Security Studies*, December 1, 2005. <https://issafrica.org/research/papers/post-war-defence-integration-in-the-democratic-republic-of-the-congo>.
- Lemarchand, René, and D.D Cordell. 2026. "History of the Democratic Republic of the Congo | Independence, Maps, Events, Dates, People, & Facts." Britannica. <https://www.britannica.com/topic/history-of-Democratic-Republic-of-the-Congo>.
- Lewis, David, Sonia Rolley, and Giulia Paravicini. 2025. "M23 Rebels Entrench Their Rule in East Congo Even as Trump Claims Peace." Reuters.

- <https://www.reuters.com/investigations/m23-rebels-entrench-their-rule-east-congo-even-trump-claims-peace-2025-12-08/>.
- McKnight, Janet. 2014. "Surrendering to the Big Picture: Historical and Legal Perspectives on Accountability in the Democratic Republic of Congo Following the Defeat of the March 23 Movement." *Stability: International Journal of Security & Development* 3, no. 1 (February): 1-11. <http://dx.doi.org/10.5334/sta.de>.
- Medecins Sans Frontieres. 2025. "https://www.msf.org/assistance-needed-people-leaving-and-staying-goma-drc-following-weeks-violence." Medecins Sans Frontieres. <https://www.msf.org/assistance-needed-people-leaving-and-staying-goma-drc-following-weeks-violence>.
- Ministerie van Buitenlandse Zaken. 2013. "Algemeen ambtsbericht Democratische Republiek Congo." Rijksoverheid. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/2013/11/27/democratische-republiek-congo-2013-11-27>.
- Muhumuza, Rodney. 2025. "As M23 rebel group advances in Congo, a new leader signals a shift in its identity." AP News. https://apnews.com/article/congo-m23-rebels-evolution-nangaa-makenga-c8c83dfff70afdd1ea112b54f93515ff?utm_source=copy&utm_medium=share.
- Mureithi, Carlos. 2025. "DRC government and M23 agree to halt fighting and work towards truce." The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/apr/24/drc-government-and-m23-make-surprise-truce-to-end-fighting-in-east-of-country?CMP=share_btn_url.
- News Agencies. 2022. "DR Congo expels Rwandan ambassador as M23 rebels seize towns." Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/30/dr-congo-expels-rwandan-ambassador-as-m23-rebels-gain-ground>.
- Nichols, Michelle. 2025. "Exclusive: Rwanda exercises command and control over M23 rebels, say UN experts." Reuters. <https://www.reuters.com/world/africa/rwanda-exercises-command-control-over-m23-rebels-say-un-experts-2025-07-02/>.
- Péclard, Didier, and Delphine Mechoulan. 2015. *Rebel Governance and the Politics of Civil War*. Switzerland: Swiss Peace Foundation. https://www.swisspeace.ch/assets/publications/downloads/Working-Papers/3b4a3caa24/Rebel-Governance-and-the-Politics-of-Civil-War-Working-Paper-15-swisspeace-didier_peclard.pdf.
- Radio Okapi. 2024. "Le M23 installe une administration parallèle à Rubaya et fait payer des taxes." <https://www.radiookapi.net/2024/06/11/actualite/societe/le-m23-installe-une-administration-parallele-rubaya-et-fait-payer-des>.
- Reyntjens, Filip. 2025. "Political Chronicles of the African Great Lakes Region 2024." 2025. <https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/publications/political-chronicles/political-chronicles-2024/>.
- Sabala, Kizito, and Vyalirendi J. Muhindo. 2025. "The East African Community Regional Force in the Democratic Republic of the Congo: Successes, Challenges and Prospects." <https://www.accord.org.za/ajcr-issues/the-east-african-community-regional-force-in-the-democratic-republic-of-the-congo-successes-challenges-and-prospects/>.

- Serwat, Ladd. 2023. "The resurgence and alliances of the March 23 Movement (M23)." ACLED. <https://acleddata.com/report/resurgence-and-alliances-march-23-movement-m23/>
- Serwat, Ladd. 2025. "Q&A What is happening in and around Goma?" ACLED. <https://acleddata.com/expert-comment/qa-what-happening-and-around-goma>.
- Serwat, Ladd. 2026. "The enemy of my enemy is my friend: How armed group alliances are shaping the battle for South Kivu." ACLED. <https://acleddata.com/report/enemy-my-enemy-my-friend-how-armed-group-alliances-are-shaping-battle-south-kivu>.
- Shepherd, Ben. 2018. "Elite Bargains and Political Deals Project: Democratic Republic of Congo (M23) Case Study." June 15, 2018. <https://www.gov.uk/government/publications/elite-bargains-and-political-deals>.
- Simpson, Fergus O., and Lorenzo Pellegrini. 2022. "Conservation, extraction and social contracts at a violent frontier: Evidence from eastern DRC's Itombwe Nature Reserve." *Political Geography* 92 (January). 102519.
- Southern African Development Community. 2024. "Executive Secretary visits the SADC Mission in the Democratic Republic of Congo (SAMIDRC)." <https://www.sadc.int/>.
- Stearns, Jason K. 2012. *From CNDP to M23 Kivu: The Evolution of an Armed Movement in Eastern Congo*. Kenya: Rift Valley Institute.
- Stearns, Jason K., Judith Verweijen, and Maria E. Baaz. 2013. *The National Army and Armed Groups in the Eastern Congo: Untangling the Gordian Knot of Insecurity*. N.p.: Rift Valley Institute. <https://riftvalley.net/publication/national-army-and-armed-groups-eastern-congo/>.
- UN Group of Experts. 2022. "Letter dated 16 December 2022 from the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo addressed to the President of the Security Council." United Nations Digital Library. <https://digitallibrary.un.org/record/3998599>.
- UN Group of experts. 2023. "Final Report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo." *UN Digital Library*, June 13, 2023.
- UN Group of experts. 2023. "Midterm report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo." *UN Digital Library*, December 15, 2023. <https://digitallibrary.un.org/record/4032027/>.
- UNHCR. 2021. "Fighting in eastern Democratic Republic of the Congo forces 11,000 to flee to Uganda." <https://www.unhcr.org/news/briefing-notes/fighting-eastern-democratic-republic-congo-forces-11-000-flee-uganda>.
- U.S Department of State. 2026. "Joint Statement on the Fifth Joint Oversight Committee for the Peace Agreement Between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda." <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/04/joint-statement-on-the-fifth-joint-oversight-committee-for-the-peace-agreement-between-the-democratic-republic-of-the-congo-and-the-republic-of-rwanda>.
- U.S Department of State. 2026. "Joint Statement on the Fifth Joint Oversight Committee for the Peace Agreement Between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda." <https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/04/joint-statement-on-the-fifth-joint-oversight-committee-for>

the-peace-agreement-between-the-democratic-republic-of-the-congo-and-the-republic-of-rwanda.

- U.S Department of the Treasury. 2024. "Treasury Sanctions Rebel Alliance Driving Instability in the Democratic Republic of the Congo." Treasury Department. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2489>.
- Walker, Joshua J. 2024. "The Resurgence of the M23: Regional Rivalries, Donor Policy, and a Stalled Peace Process." <https://cic.nyu.edu/resources/the-resurgence-of-the-m23-regional-rivalries>.
- Wingqvist, Gunilla O., and Shane Quinn. 2021. "Democratic Republic of the Congo – Mining sector overview and mapping." *Sida's Helpdesk for Environment and Climate Change*, May 11, 2021. https://sidaenvironmenthelpdesk.se/sites/default/files/2024-11/DRC%20mining%20overview%20and%20mapping_web%20report%202021.pdf.